

**ANALISIS KEPATUHAN PEMERINTAH EL SALVADOR TERHADAP
UNTOC DALAM UPAYA PENANGANAN *HUMAN TRAFFICKING* (2019-
2022)**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

DIVA WAFFIYA

19323022

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2023

**ANALISIS KEPATUHAN PEMERINTAH EL SALVADOR TERHADAP
UNTOC DALAM UPAYA PENANGANAN *HUMAN TRAFFICKING* (2019-
2022)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional

Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

DIVA WAFFIYA

19323022

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2023

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS KEPATUHAN PEMERINTAH EL SALVADOR TERHADAP UNTOC DALAM UPAYA PENANGANAN *HUMAN TRAFFICKING* (2019-2022)

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Dewan Penguji

Tanda Tangan

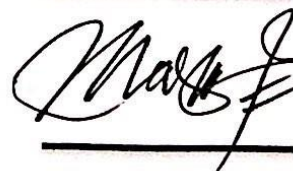
1. Mohammad Rezky Utama, S.IP., M.Si.



2. Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.



3. Masitoh Nur Rohma, S.Hub.Int., M.A.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Yogyakarta, 5 Juli 2023



Diva Waffiya

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GRAFIK	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR SINGKATAN.....	viii
ABSTRAK.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Cakupan Penelitian.....	7
1.5 Tinjauan Pustaka.....	7
1.6 Kerangka Pemikiran.....	10
1.7 Argumen Sementara.....	12
1.8 Metode Penelitian.....	13
1.8.1 Jenis Penelitian.....	13
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian.....	13
1.8.3 Metode Pengumpulan Data.....	13
1.8.4 Proses Penelitian.....	14
1.9 Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II EL SALVADOR DAN KEJAHATAN PERDAGANGAN MANUSIA...15	

2.1 Kejahatan Perdagangan Manusia di El Salvador (2019-2022).....	15
2.2 Faktor Penyebab Kejahatan Perdagangan Manusia di El Salvador.....	20
2.2.1 Faktor Ekonomi.....	20
2.2.2 Faktor Imigrasi Tidak Teratur.....	24
2.3 Ratifikasi El Salvador terhadap UNTOC.....	27
2.4 Upaya Penanganan Perdagangan Manusia oleh Pemerintah El Salvador (2019-2021).....	30
BAB III ANALISIS KEPATUHAN PEMERINTAH EL SALVADOR TERHADAP UNTOC DAN PROTOCOL TO PREVENT, SUPPRESS, AND PUNISH TRAFFICKING IN PERSONS, ESPECIALLY WOMEN AND CHILDREN.....	41
3.1 Kepatuhan El Salvador terhadap United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC).....	41
3.2 Analisis Faktor Kepentingan Nasional El Salvador terhadap Kepatuhan.....	47
BAB IV PENUTUP.....	56
4.1 Kesimpulan.....	56
4.2 Rekomendasi.....	59
DAFTAR PUSTAKA.....	60

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Tingkat Pengangguran El Salvador (2014-2021).....	20
Grafik 2. Perkiraan Angka Pengangguran El Salvador (2011-2022).....	21
Grafik 3. Angka Kemiskinan El Salvador (2015-2022).....	22
Grafik 4. Jumlah Rata-Rata Orang Keluar El Salvador (2021).....	27

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tingkat Pendaftaran Khusus Berdasarkan Kelas (2014-2022).....	23
------------------------------------------------------------------------	----

DAFTAR SINGKATAN

AS	: Amerika Serikat
CONNA	: y Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia
CTPT	: Comisión Trinacional de Plan trifinio
DGME	: Dirección General de Migración y Extranjería
ECLAC	: The Economic Commission for Latin America and the Caribbean
FGR	: Fiscalía General de la República
HAM	: Hak Asasi Manusia
IOM	: International Organization of Migration
ISDEMU	: Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer
ISNA	: Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia
ICMEC	: International Center for Missing and Exploited Children
MS-13	: Mara Salvatrucha
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
LGBTI	: Lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex
MTPS	: Ministerio de Trabajo y Previsión Social
MIGOB	: Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial
MITUR	: Ministerio de Turismo
MINSAL	: Ministerio de Salud
MJSP	: Ministerio de Justicia y Seguridad Pública
MINED	: Ministerio de Educación

MRREE	: Ministerio de Relaciones Exteriores
OIM	: Organización Internacional para las Migraciones
PDB	: Produk Domestik Bruto
PNC	: Policía Nacional Civil
SICA	: Central American Integration System
UNODC	: United Nations Office on Drugs and Crime
UNTOC	: United Nations Convention Against Transnational Organized Crime
UNODC ROPAN	: The United Nations Office on Drugs and Crime for Central America and the Caribbean

ABSTRAK

Kejahatan transnasional terorganisir adalah salah satu isu yang menjadi fokus bagi negara-negara di dunia. Perdagangan manusia merupakan satu dari sekian contoh bentuk kejahatan transnasional terorganisir. Kejahatan ini seringkali dilakukan oleh geng. El Salvador merupakan negara yang memiliki concern terhadap penumpasan kejahatan geng, termasuk perdagangan manusia. Kejahatan ini disebabkan adanya faktor ekonomi dan migrasi tidak teratur. Kebanyakan korban dari perdagangan manusia adalah perempuan dan anak-anak. Kejahatan dimanifestasikan dengan berbagai bentuk eksploitasi. Pemerintah Bukele merespon kejahatan geng dengan keras dan radikal. Keanggotaannya dalam UNTOC dan *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children* dianggap dapat mengupayakan pemenuhan kepentingan nasional El Salvador. Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan *Compliance Theory* oleh Ronald B Mitchell dalam menganalisis tingkat kepatuhan tindakan dan kebijakan El Salvador terhadap kedua perjanjian di atas sebagai Negara Pihak.

Kata kunci: El Salvador, Perdagangan Manusia, UNTOC, Teori Kepatuhan, Kepentingan Nasional.

ABSTRACT

Transnational organized crime is one of the issues that has become a focus for countries around the world. Human trafficking is one of many examples of transnational organized crime. These crimes are often committed by gangs. El Salvador is a country that is concerned with eradicating gang crime, including human trafficking. This crime is caused by economic factors and irregular migration. Most victims of human trafficking are women and children. The crime is manifested in various forms of exploitation. The Bukele government responded to gang crime harshly and radically. El Salvador's membership in UNTOC and the Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, is regarded as capable of advancing the country's national interests. In this study, the author will use Compliance Theory by Ronald B. Mitchell in analyzing the level of compliance of El Salvador's actions and policies with the two agreements above as a state party.

Key words: El Salvador, Human Trafficking, UNTOC, Compliance Theory, National Interest.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Amerika Latin merupakan kawasan yang menjadi jalur kegiatan perdagangan manusia. Ada beberapa pemicu terjadinya kejahatan, di antaranya adalah kekerasan politik, kemiskinan, ketidaksetaraan gender, pengangguran, dan rasa acuh pada anak-anak, remaja, perempuan. Menurut the Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC), tingkat kemiskinan Amerika Latin mencapai 32,3% dari total populasi kawasan. Sementara itu, tingkat pengangguran juga tercatat cukup tinggi, terkhusus untuk perempuan, yakni meningkat 9,5% dari tahun 2019 menjadi 11,6% pada tahun 2022 (ECLAC, 2022). Isu diperparah dengan adanya liberalisasi kebijakan perbatasan, globalisasi, dimana sangat mempermudah pergerakan orang dan peluang pasar bagi para sindikat kejahatan perdagangan manusia.

Korban perdagangan manusia di kawasan ini adalah Wanita dewasa usia muda (usia 18-25 tahun) dan anak-anak (usia 12-17 tahun). Faktor penyebabnya adalah keharusan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, bentuk tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga tunggal, kurangnya pendidikan, dan buta huruf (Langberg, 2005). Menurut Organisasi Regional Perserikatan Bangsa-Bangsa, persentase anak muda berusia 18-24 tahun yang tidak berpendidikan meningkat dari 22,3% pada 2019 menjadi 28,7% pada tahun 2020 (ECLAC, 2022). Terkait dengan tingkat buta huruf, terdapat penduduk usia muda dan dewasa sebanyak 12,8% di pedesaan yang masih mengalami buta huruf (ECLAC, 2022).

Trafficker memiliki strategi dan taktik dalam melakukan kejahatan ini. Mereka sangat mengetahui undang-undang dan kebijakan serta praktik migrasi. Perdagangan manusia merupakan salah satu bentuk kejahatan terorganisir. *Trafficker* membentuk jaringan dengan agen swasta dan publik, seperti supir taksi, becak, supir truk, dan para pengirim barang. Selain itu, mereka memanfaatkan media untuk melakukan perekrutan dengan cara memasang iklan baris yang menawarkan pekerjaan palsu. Pemilik klub malam dan bar turut ikut dalam merekrut dan mengeksploitasi korban (Thomas J. Boerman, 2020).

Perdagangan manusia di Kawasan ini ditujukan untuk eksploitasi seksual dan kerja paksa. Kejahatan ini terfokus pada wilayah-wilayah yang toleransi perdagangannya lebih tinggi daripada wilayah lain, seperti perbatasan, pelabuhan, dan sepanjang rute internasional. Hal ini diperparah dengan pendirian kasino dan pariwisata seks yang terorganisir. Negara yang ada di Kawasan Amerika Latin diidentifikasi menjadi negara sumber, transit, dan tujuan. Negara sumber di antaranya adalah El Salvador, Honduras, Nikaragua, Guatemala, dan Republik Dominika (Langberg, 2005). Sedangkan, yang termasuk dalam negara transit dan tujuan adalah Belize, Panama, Meksiko, dan Kosta Rika. Negara sumber memiliki karakteristik tingkat buta huruf yang tinggi pada kaum muda dan angka Produk Domestik Bruto (PDB) yang rendah. Walaupun tingkat melek huruf masyarakat El Salvador terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, negara ini masih berada pada urutan ketujuh di Kawasan Amerika Latin dengan presentase tingkat melek huruf 89,98% per tahun 2020 (the Global Economy, 2020).

Salah satu negara sumber yang disebutkan di atas adalah El Salvador. Banyak anak dan perempuan, serta transgender menjadi sasaran jaringan

perdagangan manusia. Menurut Direktur Jenderal Statistik dan Sensus dalam hasil Survei Rumah Tangga Multiguna Tahunan El Salvador 2020, per tahun 2021, sebanyak 88.300 anak usia 5-17 tahun bekerja (U.S Department of Labor, 2021). Kementerian Pendidikan juga melaporkan bahwa lebih dari 851.794 anak tidak melakukan pendaftaran sekolah untuk tahun ajaran 2021, dan hanya 6 dari 10 siswa yang menyelesaikan wajib belajar 9 tahun. Antara Januari hingga Juni 2021, pemerintah melaporkan ada 3.419 kasus kekerasan seksual, dimana sebanyak lebih dari 60% nya terjadi pada anak perempuan di bawah delapan belas tahun (OCHA, 2022). Lingkungan yang dianggap tidak memiliki keamanan fisik dan peluang ekonomi yang bagus, membuat banyak perempuan memutuskan untuk bergabung dalam geng. Keputusan tersebut semakin meningkatkan potensi diri nya menjadi korban perdagangan manusia.

El Salvador memiliki geng yang terkenal dalam kegiatan perdagangan manusia, yakni *Mara Salvatruci* atau MS-13 dan Barrio 18 yang saling bersaing, yang terakhir terpecah menjadi dua faksi, Surenos dan Revolucionarios (Global Organized Crime Index, 2021). Anggota geng memiliki latar belakang sosial ekonomi miskin dan didominasi oleh laki-laki muda. Geng ini tidak lagi menggunakan tato ciri khas mereka guna terhindar dari perhatian pihak berwenang. Sumber utama pendapatan mereka adalah pemerasan. Selain itu, mereka juga menjadikan pendapatan dari kejahatan transnasional (perdagangan manusia dan narkoba) dan pemungutan uang sewa sebagai tambahan pendapatan. Geng ini merupakan perwujudan dari jaringan perdagangan manusia, karena membentuk jaringan dari berbagai sektor, seperti pariwisata, swasta, hiburan, dan industri. El Salvador memanfaatkan media untuk melakukan perekrutan korban dengan dalih

menawarkan pekerjaan. Korban *trafficking* biasanya berusia sekitar 9-15 tahun. Pejabat korup sering dijadikan target oleh geng untuk diberikan uang suap dengan permintaan imbalan dukungan politik untuk geng. Ada indikasi bahwa aktor negara memfasilitasi tindak pidana, menghalangi penyidikan, melindungi pelaku kejahatan, dan menjual senjata kepada geng. Berdasarkan sumber, polisi terindikasi berbagi informasi mengenai cara menutupi tindakan kejahatan dan secara sistematis mengeksekusi tersangka anggota geng di luar hukum (Farah, 2011).

Pada tahun 2019, angka kasus perdagangan manusia mencapai 80 kasus (U.S Department of State, 2020). Satu tahun berikutnya, sebanyak 30 kasus perdagangan manusia diselidiki oleh pihak terkait (U.S Department of State, 2021). Angka kasus perdagangan naik kembali pada tahun 2021, yakni sebanyak 45 kasus (U.S Department of State, 2022). Banyaknya kasus kejahatan ini membuat pemerintah El Salvador mengupayakan perlindungan kepada masyarakatnya. Upaya tersebut dapat dibuktikan dengan beberapa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Pada tahun 2019, pemerintah melakukan penyelidikan terhadap pejabat pemerintah yang diduga terlibat dalam isu ini, menghukum tersangka dengan hukuman penjara yang lebih signifikan, dan memberikan pelayanan kepada korban, terutama perempuan. Pada tahun 2020, upaya terus dilakukan dengan menyelidiki, menuntut, dan menghukum pelaku. Selain itu, pemerintah juga menambah jumlah jaksa agung. Tahun berikutnya pemerintah juga melakukan koordinasi dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk memberikan bantuan kepada korban.

Dalam upayanya mengatasi kejahatan perdagangan manusia, PBB membentuk United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). Badan tersebut terbentuk khusus menangani kasus kejahatan transnasional, termasuk perdagangan

manusia. UNODC memiliki sebuah kerangka hukum, yakni *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNTOC) yang digunakan sebagai dasar dalam kerja sama internasional, khususnya untuk memerangi kejahatan transnasional. UNTOC dilengkapi dengan tiga protokol untuk mengisi kekurangan di dalamnya, protokol tersebut diantaranya adalah: *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children*; *Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air*; dan *Protocol against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Their parts and Components and Ammunition*.

Berdasarkan UNODC, El Salvador telah menandatangani UNTOC dan protokolnya, yang masing-masing dilakukan pada 14 Desember 2000 dan 15 Agustus 2002. Pemerintah meratifikasi keduanya pada 18 Maret 2004. Ratifikasi tersebut membuat El Salvador memiliki kewajiban untuk patuh dan mengadopsi regulasi yang telah ditetapkan dalam UNTOC dan Protokolnya ke dalam hukum domestiknya. Ini terbukti dalam *Special Law Against Human Trafficking* dan *the Inter-Institutional Action Protocol for the Immediate Comprehensive Care of Victims of Human Trafficking*, yakni kerangka hukum yang dibuat oleh pemerintah El Salvador sebagai kewajiban negara anggota yang telah meratifikasi UNTOC.

Sebagai negara anggota UNTOC, kewajiban yang perlu untuk dilakukan oleh El Salvador berkaitan erat dengan kata “kepatuhan”. Negara yang dapat mengimplementasikan peraturan dalam UNTOC dapat dikatakan sebagai negara yang patuh. Namun, untuk mengkategorikan patuh atau tidaknya negara terhadap perjanjian internasional tidak sesederhana itu. Termasuk dalam hal ini kepatuhan El Salvador terhadap UNTOC dan Protokolnya. Penulis tertarik untuk

menganalisis kepatuhan pemerintah atas UNTOC dengan menggunakan teori kepatuhan milik Ronald B Mitchell. Menurut Mitchell, ada beberapa alasan yang membuat negara patuh atau tidak patuh terhadap perjanjian internasional, yang pada akhirnya hal tersebut membuat negara-negara dikategorisasikan ke dalam beberapa bentuk kategori kepatuhan.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana kepatuhan pemerintah El Salvador terhadap UNTOC dalam menangani *human trafficking* (2019-2022)?

1.3 Tujuan Penelitian

Riset ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan isu perdagangan manusia di El Salvador.
2. Untuk menjelaskan upaya pemerintah El Salvador dalam meminimalisir adanya kejahatan perdagangan manusia di negaranya periode tahun 2019-2021.
3. Untuk menganalisis kepatuhan pemerintah El Salvador terhadap UNTOC menggunakan *Compliance Theory* oleh Ronald B Mitchell.

1.4 Cakupan penelitian

Tahun 2019 dipilih oleh penulis karena menandai dimulainya pemerintahan presiden El Salvador, Nayib Bukele. El Salvador dianggap menarik untuk diteliti karena merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat pembunuhan tertinggi dibandingkan dengan kasus kejahatan lain, yakni 35,3 kematian akibat kekerasan untuk setiap 100.000 penduduk di tahun 2019 (Maria Alejandra Navarrete, 2020).

Selain itu, negara ini termasuk ke dalam Kawasan Segitiga Amerika Tengah Utara (El Salvador, Honduras, Guatemala) yang terkenal akan kejahatan terorganisir nya. Penulis melihat bahwa kepemimpinan Nayib Bukele banyak memberikan *concern* terhadap aktivitas kejahatan geng, termasuk *human trafficking*. Upaya penanganan kejahatan perdagangan manusia akan dipadukan dengan kepatuhan pemerintah El Salvador terhadap UNTOC dan *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children*. Penulis akan menggunakan *Compliance Theory* oleh Ronald B Mitchell untuk menganalisis kepatuhan El Salvador. Melalui *Compliance Theory* akan diketahui faktor-faktor di balik kepatuhan atau ketidakpatuhan negara ini terhadap UNTOC dan Protokol di atas.

1.5 Tinjauan Pustaka

Salah satu sub bab *E-book* yang berjudul “*A Review of Recent OAS Research on Human Trafficking in the Latin American and Caribbean Region*”, ditulis oleh Laura Langberg milik International Organization of Migration (IOM), membahas isu perdagangan manusia di Kawasan Amerika Latin dan Karibbean dan berfokus pada korban perempuan dan remaja. Menurutnya ada kebingungan bahasa dan pemahaman yang kurang jelas antara makna perdagangan dan penyelundupan migran. Faktor yang memicu aktivitas kejahatan perdagangan manusia adalah kekerasan politik dan sosial, kemiskinan, ketidaksetaraan gender, dan lain-lain. Undang-undang dirasa kurang spesifik dalam mengatur kejahatan ini. Seringkali pejabat publik dan imigrasi turut membantu *trafficker*. Karena sifatnya yang terorganisir, banyak pihak yang terlibat, seperti agen swasta dan publik,

pengemudi taksi, media, layanan internet, bahkan pengacara turut terlibat untuk memalsukan dokumen (Langberg, 2005).

Lebih lanjut *working paper series* yang ditulis oleh Douglas Farah, dengan judul “*Organized Crime in El Salvador: The Homegrown and Transnational Dimensions*”, berisi pemaparan bahwa geografis menjadi faktor utama pemicu terjadinya perdagangan manusia di El Salvador. Farah menjelaskan bahwa tingkat pembunuhan di negara itu berada di urutan kelima sebagai negara dengan tingkat pembunuhan tertinggi di dunia. Organisasi dan jaringan kriminal telah berakar di negara tersebut dan memanfaatkan beberapa wilayah untuk melanggengkan kekerasan dan kejahatan mereka, termasuk penyelundupan barang, perdagangan manusia, narkoba, dan senjata. Hal ini diperparah dengan kemiskinan, pemerintah korup, dan institusi sipil yang lemah. Kegiatan utamanya adalah perdagangan manusia dan diperburuk dengan indikasi beraliansi dengan kelompok kepentingan politik dan ekonomi. Salah satu geng yang terkenal dengan kejahatan terorganisirnya adalah *Mara Salvatrucha* (MS 13). Kondisi geografis menjadi keuntungan karena negara telah lama menjadi area transit untuk perdagangan manusia dan narkoba dari Kolombia ke Meksiko dan Amerika Serikat (AS). Penjagaan Pantai Pasifik yang kurang ketat dan perbatasan Guatemala dan Honduras yang sangat rentan, serta hanya dipisahkan oleh sebuah teluk kecil dengan Nikaragua, negara ini menjadi rute transit yang paling aman dan nyaman (Farah, 2011).

Berbeda dengan Langberg dan Farah yang berfokus pada kejahatan terorganisir perdagangan manusia, Maria Sol Pikielny dan María Jesús Mora, dalam *working paper* nya yang berjudul “*Institutional and Legal Migratory Framework*

of the Republic of El Salvador: A Working Paper”, lebih melihat kepada peran dan implementasi kebijakan imigrasi yang dilakukan oleh pemerintah El Salvador. Pikielny dan Mora juga menjelaskan secara singkat bagaimana upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada keluarga dan korban perdagangan manusia. Telah ada *Legal Framework* untuk melawan tindakan perdagangan manusia, yakni *Special Law Against Human Trafficking* dan *the Inter-Institutional Action Protocol for the Immediate Comprehensive Care of Victims of Human Trafficking of 2018*. Melalui *Protocol for the Immediate Comprehensive Care of Victims of Human Trafficking*, institusi yang terkait akan bekerja sama untuk memberikan perlindungan terhadap korban (María Sol Pikielny, 2021).

Penulis dapat sampaikan bahwa ketiganya memiliki kekurangan dalam menjelaskan isu perdagangan manusia. Tulisan milik Langberg belum secara spesifik menjelaskan isu perdagangan manusia di El Salvador dan banyak menjelaskan impunitas dari hukum yang ada di Amerika Latin. Lemahnya kebijakan public dan minimnya undang-undang yang ada, menarik minat penulis untuk meneliti dan membuktikan kebenaran dari kebijakan pemerintah. Walaupun tulisan milik Farah banyak membahas terkait dengan perdagangan narkoba, namun penulis merasa masih dapat digunakan sebagai rujukan. Karena jalur perdagangan narkoba sering digunakan sebagai jalur perdagangan manusia juga. Sifat kejahatan yang sama-sama terorganisir memunculkan asumsi bahwa pejabat pemerintahan dan pengadilan turut memiliki peran dalam kejahatan ini. Namun, belum secara eksplisit menjelaskan mengenai alasan di balik tingginya angka pembunuhan di El Salvador, apakah karena isu perdagangan manusia atau bukan. Sementara itu, *working paper* milik Pikielny dan Mora dirasa oleh penulis sangat berkaitan erat

dengan penelitian yang ingin dilakukan, namun belum dianalisis dengan teori yang spesifik.

1.6 Kerangka Pemikiran

Penulis akan menggunakan Teori Kepatuhan oleh Ronald B Mitchell. Mitchell menyatakan bahwa kepatuhan negara terhadap perjanjian internasional dapat dikategorikan menjadi dua, yakni *independent self-interest* dan *interdependent self-interest*. *Compliance as independent self-interest* merupakan bentuk kepatuhan negara yang terjadi ketika perjanjian banyak mewakili kepentingan nasionalnya. Pembentukan kesepakatan seringkali digunakan oleh para aktor untuk mempromosikan kepentingan nasional mereka. Melalui negosiasi, negara dapat memanfaatkan penempatan beban kepatuhan terhadap negara lain. Alasan kepatuhan dilihat dari ketakutan yang ingin dihindari dalam tindakan ketidakpatuhannya, seperti efek samping pelanggarannya di masa depan, opini publik yang merugikan. Kategori *compliance as independent self-interest* menjelaskan bahwa kepentingan akan menjadi penentu tingkat kepatuhan negara terhadap perjanjian (Mitchell, 1996).

Mitchell menjelaskan bahwa *compliance as interdependent self-interest* merupakan kepatuhan negara yang terjadi ketika ada *enforcement* atau paksaan yang diberikan oleh negara hegemonik. Interdependensi kepentingan antar aktor meningkatkan kepatuhan pihak penandatangan. Kepentingan tidak dapat tercapai apabila pihak terkait tidak sama-sama melakukan kepatuhan. Negara yang menyadari bahwa kepatuhannya dapat mendorong negara lain untuk patuh, seringkali melihat manfaat yang didapatkan lebih banyak. Sehingga kepatuhan akan dipaksakan oleh negara kuat kepada negara berkembang. Mereka menggunakan

klaim bahwa ketidakpatuhan yang dilakukan oleh suatu aktor mungkin akan memunculkan masalah bersama. *Compliance as interdependent self-interest* menjelaskan bahwa kepatuhan bukan dilakukan secara independen, melainkan interdependen, baik dari koordinasi, kepentingan, dan pemberian sanksi.

Mitchell juga memberikan kategorisasi ketidakpatuhan negara atas rezim internasional. Pertama, *non-compliance as preference*, yakni ketidakpatuhan yang terjadi ketika keuntungan yang didapatkan lebih tinggi daripada negara harus patuh terhadap perjanjian. Pilihan tersebut muncul karena beberapa alasan: a) Aktor menandatangani perjanjian dengan tujuan mendapatkan keuntungan politik dari keanggotaannya, artinya, sejak awal tidak ada niatan melakukan kepatuhan; b) Negara ingin terhindar dari tekanan domestik dan internasional; c) Anggapan bahwa ketidaksesuaian kepentingan nasional dengan perjanjian yang menyebabkan keraguan untuk patuh. Implikasinya, aktor sepakat untuk penandatanganan, namun hanya untuk mematuhi sebagian besar tetapi tidak semua norma. Tergantung pada keuntungan yang didapatkan dari kepatuhan.

Kedua, *non-compliance due to incapacity*, adalah ketidakpatuhan negara karena keterbatasan sumber daya untuk mengimplementasikan norma perjanjian. Ketidakpatuhan muncul dari keterbatasan sumber keuangan, administrasi, dan teknologi. Bukan karena ketidak inginannya untuk mematuhi perjanjian. Sumber-sumber ketidakpatuhan tersebut membuat Negara Pihak lain membentuk mekanisme untuk membantu pembiayaan kepatuhan. Tindakan kepatuhan yang dibebankan seringkali menguji kapabilitas pemerintah untuk dapat merubah perilaku segudang aktor subnasional agar sejalan dengan norma perjanjian. Pada akhirnya kegagalan tersebut akan mengkategorisasikan negara sebagai aktor yang

tidak patuh.

Ketiga, *non-compliance due to inadvertence* merupakan ketidakpatuhan yang terjadi ketika negara telah berupaya untuk patuh, namun gagal untuk memenuhi tujuan rezim internasional. Seringkali butir kesepakatan mencakup target nasional yang harus terpenuhi, dengan penggunaan tenggat waktu. Ketidakmampuan negara dalam memenuhi dua hal tersebut menyebabkan pelanggaran dan membawa aktor ini ke jurang ketidakpatuhan. Permasalahan ini tidak hanya berlaku pada negara berkembang. Dampak kebijakan yang dibentuk oleh negara maju, tidak memiliki jaminan dapat merubah perilaku warga dan perusahaan di negaranya. Artinya, ketidakpatuhan mungkin tidak dapat dihindarkan, sekalipun aktor merupakan negara hegemonik.

1.7 Argumen Sementara

Penulis menggunakan teori kepatuhan oleh Ronald B Mitchell untuk menganalisis kepatuhan El Salvador terhadap Rezim Perdagangan Manusia Internasional dalam menangani kejahatan *human trafficking*. El Salvador menunjukkan upaya signifikan pada tahun 2019 hingga 2021 dalam menangani kejahatan ini. Kebijakan dibuat berdasar pada pasal-pasal dalam UNTOC dan Protocol *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children*. Contohnya adalah pemerintah bekerja sama dengan LSM terkait untuk memberikan layanan kepada korban kejahatan. Upaya ini sesuai dengan Pasal 6,9, dan 10 dalam protokol di atas, yang menyebutkan setiap Negara Pihak wajib bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah. Penulis berasumsi bahwa tindakan tersebut termasuk ke dalam kategori *compliance as*

independent self-interest, yakni kepatuhan terhadap perjanjian internasional yang dilakukan negara karena dapat mendorong pencapaian kepentingan nasionalnya. Peraturan yang terbentuk dalam rezim perdagangan manusia internasional dianggap mewakili kepentingan nasional El Salvador, yakni ingin terhindar dari kejahatan transnasional, termasuk perdagangan manusia.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian adalah kualitatif. Menurut Liz Spencer, penelitian kualitatif memiliki tujuan untuk mengetahui perspektif, sejarah, pengalaman, atau sering disebut dengan *concern* untuk menemukan perspektif actor, dan penuh akan data.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah pemerintah El Salvador. Objek penelitiannya adalah kepatuhan pemerintah terhadap UNTOC. Sesuatu hal yang dilakukan subjek akan berpengaruh terhadap objek. Artinya upaya yang dilakukan oleh pemerintah akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan El Salvador terhadap UNTOC.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Penulis menggunakan metode pengumpulan data berbasis dokumen dan internet. Metode pengumpulan data berdasar pada dokumen, seperti dalam bentuk dokumen perjanjian, laporan resmi, laporan media, dan pernyataan kebijakan. Sedangkan metode pengumpulan data berbasis internet yakni mengumpulkan informasi dan data melalui sumber yang ada di internet.

1.8.4 Proses Penelitian

Penelitian dimulai dengan mencari topik bahasan dan isu yang sesuai dengan fokus penulis. Kemudian, mencari teori atau pendekatan yang dapat digunakan untuk menganalisis sebuah isu yang diangkat. Setelah itu, melakukan riset dan mencari data terkait untuk menjadi bahan acuan penelitian melalui internet dan dokumen terkait. Isu di elaborasikan dengan teori yang telah dipilih dan diambil kesimpulan.

1.9 Sistematika Pembahasan

Bab 1 akan berisi Pendahuluan, yang terbagi menjadi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan cakupan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, argumen sementara, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab 2 berisi Pembahasan, akan membahas Kejahatan Perdagangan Manusia di El Salvador, Faktor Penyebab Kejahatan Perdagangan Manusia, Ratifikasi El Salvador terhadap UNTOC dan Protocol, dan Upaya Penanganan Perdagangan Manusia oleh El Salvador. Bab 3 berisi analisis kepatuhan pemerintah El Salvador terhadap UNTOC dengan menggunakan *Compliance Theory*. Pada bab ini juga akan mengetahui alasan apakah yang membuat pemerintah El Salvador patuh atau tidak patuh terhadap Rezim Perdagangan Manusia Internasional. Bab 4 berisi Kesimpulan dan Rekomendasi.

BAB II

EL SALVADOR DAN KEJAHATAN PERDAGANGAN MANUSIA

2.1. Kejahatan Perdagangan Manusia di El Salvador (2019-2022)

Kejahatan perdagangan manusia di El Salvador dimanifestasikan dengan eksploitasi seksual dan kerja paksa. Pelaku mengeksploitasi pria, wanita, remaja, dan anak-anak dengan tujuan komersial di dalam negeri. Diperkirakan sebanyak 16.000 orang El Salvador hidup dalam ancaman dan kondisi perbudakan (Tenorio, 2019). Kelompok rentan yang dianggap sangat beresiko bersinggungan dengan kejahatan ini termasuk anak di bawah umur tanpa orang tua dan orang-orang LGBTI. Menurut data yang diberikan oleh Jaksa Agung Republik, pada tahun 2019, tercatat sebanyak 232 anak perempuan, laki-laki, dan remaja telah menjadi korban perdagangan manusia.

Apabila jumlah korban kejahatan di atas dipresentasikan, maka akan terlihat sebanyak 53,45% anak remaja perempuan dan 46,55% anak remaja laki-laki. Pada tahun 2019, Badan Perlindungan Anak dan Remaja menerima 10 kasus perdagangan anak perempuan, laki-laki, dan remaja. Dari jumlah tersebut, diduga sebanyak 72,72% adalah remaja perempuan dan 27,27% adalah remaja laki-laki (Ministerio de Relaciones Exteriores, 2021). San Miguel adalah wilayah yang tercatat paling banyak melaporkan kasus perdagangan manusia, yakni 16 kasus atau setara dengan 30% dari total kasus, yang diikuti oleh San Salvador dengan 9 kasus atau sama dengan 17% (Observatorio, 2021). Mayoritas korban kejahatan ini adalah perempuan dan anak-anak, yang termasuk ke dalam kelompok rentan yang mudah tertipu.

Kasus perdagangan manusia diawali dengan penyamaran pelaku sebagai majikan rumah tangga yang menghasut korban, terutama perempuan, untuk menikah secara paksa. Sedangkan, kelompok orang dewasa dan anak-anak sering dipaksa untuk bekerja sebagai petani, pengemis, buruh di industri tekstil, dan pembantu rumah tangga. Selain itu, anak-anak secara aktif direkrut dan dipersenjatai untuk melakukan kegiatan ilegal, seperti pembunuhan, perdagangan narkoba, pemerasan, dan pemaksaan untuk memberikan layanan seksual (Boerman, 2019). Berdasarkan laporan, sejak Januari-Desember 2020 dan Januari-April 2021, Kejaksaan Agung telah mencatat sebanyak 54 kasus tindak pidana perdagangan manusia. Dari jumlah tersebut, 36 kasus terjadi pada tahun 2020 dan 18 kasus dari Januari hingga April 2021, yang terdiri dari 70% perempuan, 6% laki-laki, dan 24% belum ditentukan. Dari 54 kasus di atas, tercatat bahwa 37% korban kejahatan adalah anak perempuan dan remaja di bawah usia 17 tahun (Observatorio, 2021). Korban perempuan sering dijadikan sebagai subjek eksploitasi seksual. Sedangkan korban yang lain menjadi subjek eksploitasi kerja paksa (Lopez).

Kasus perdagangan manusia di El Salvador tidak selalu dimanifestasikan dalam bentuk kekerasan dan ancaman. Tetapi dapat muncul dalam bentuk migrasi dengan penipuan untuk harapan hidup lebih baik. Pada tahun 2020, terdapat tuduhan atas kejahatan perdagangan manusia kepada tiga orang Salvador, yakni Fatima Perez, Juan Rufimo Ramirez, dan Jose Eusebio Asegurado. Pekerjaan masing-masing sebelumnya adalah pemilik stan pupusa kecil di Sonsonate, satpam di San Salvador, dan petani di Usulután. Mereka bertiga dituduh mempromosikan perdagangan manusia melalui WhatsApp dan terbukti memposting di media sosial menyebarkan berita tentang karavan migran. Pada malam natal 2020, melalui

halaman Facebook dengan nama “Caravan de Immigrantes 2020”, diketahui bahwa beberapa Salvadorans berencana melakukan pertemuan dengan karavan Honduras dengan tujuan AS (Gressier, 2021).

Melalui Facebook, Perez juga pernah membalas komentar seperti “Kirim saya nomor Anda agar saya dapat memberikan tautannya kepada Anda”. Grup WhatsApp sendiri diduga dibentuk oleh Ramirez dengan nama “caravan 503 el salvador” yang beranggotakan 55 orang. Melalui grup, mereka berdiskusi untuk sepakat bertemu di Terminal bus de Occidente, San Salvador. Kemudian mereka akan berjalan ke lingkungan perumahan kelas atas San Benito untuk membeli tiket bus seharga \$60. Setelahnya, mereka kembali ke Salvador del Mundo Plaza untuk bermalam, sebelum keesokannya naik bus menuju Guatemala (Gressier, 2021).

Terpilihnya Nayib Bukele pada pemilu Presiden El Salvador tahun 2019, membuat dirinya mewarisi negara yang dilanda kekerasan kelompok kriminal dengan jaringan transnasionalnya. Bukele menyebutkan bahwa prioritas utamanya adalah mengekang kejahatan, termasuk perdagangan manusia yang dilakukan oleh MS-13 dan dua faksi Barrio 18, yakni Sureños dan Revolucionarios (González, 2022). Diketahui mereka telah berevolusi menjadi organisasi kriminal transnasional yang terkait dengan kejahatan perdagangan manusia, jaringan narkoba, pembunuhan, dan memiliki jangkauan seluruh bagian kota (Brigida, 2020). Mereka mengembangkan jaringan kejahatan hingga melewati batas negara. Semula mereka adalah kelompok pemuda berorientasi lingkungan yang memperjuangkan untuk menguasai wilayah lokal (Thomas J. Boerman, 2020). Otoritas terkait mencatat bahwa sekitar 60.000 anggota geng aktif beroperasi di 94 persen kota madya. Setiap anggota mengandalkan jaringan setidaknya sekitar enam orang, baik sebagai

kerabat atau kolaborator. Sejak Bukele mengambil alih kepemimpinan, tingkat pembunuhan dan kasus orang hilang menurun secara signifikan, yakni masing-masing 60% dan 40% (International Crisis Group, 2020).

Pemerintahan Bukele dinilai telah melakukan negosiasi dan menyepakati pakta rahasia dengan MS-13 dan dua faksi Barrio 18 (Parlberg, 2022). Catatan yang dianalisis dan dipublikan oleh El Faro tentang pertemuan antara pejabat administrasi dan anggota geng sudah dilakukan sejak 18 Oktober 2019 (Carlos Martínez, 2020). Indikasi tersebut muncul ketika mantan jaksa senior anti-korupsi, German Arriaza, mengajukan tuduhan bahwa pemerintah Bukele membicarakan kesepakatan dengan geng. Arriaza mengatakan kepada organisasi berita bahwa timnya telah mengumpulkan bukti-bukti negosiasi, termasuk foto Wakil Menteri Kehakiman, Osiris Luna dan Carlos Marroquin, Kepala Badan Kesejahteraan Sosial Pemerintah berkunjung ke penjara untuk melakukan pembicaraan dengan geng mengenai gencatan senjata (Kinosian, 2021). Sebagai imbalan atas pengurangan kejahatan, anggota geng diberikan insentif dengan kondisi penjara yang lebih baik dengan “tunjangan lainnya”, seperti pemberian kesempatan kerja dan pembiayaan mikro kepada anggota mereka, memberikan izin kunjungan suami-istri di penjara, dan mengakhiri operasi militer dan polisi anti-geng (Rouhandeh, 2021). Kesepakatan termasuk dukungan politik oleh geng terhadap partai politik *Nuevas Ideas* dalam pemilu dan pemilihan legislatif 2021 (U.S Department of the Treasury, 2021).

Kejahatan perdagangan manusia yang bersifat terorganisir, memunculkan indikasi adanya pejabat pemerintah juga turut menjadi pelaku kejahatan ini. Pada Juni 2017, ada kesaksian seorang pedagang manusia, yang menggunakan samaran

“Romero Uno”, di hadapan pengadilan San Salvador untuk bersaksi melawan pimpinannya. Dia menyebut bahwa José Bladimir Barahona Hernández, yang sekarang menjadi legislator dari partai Nayib Bukele, Nuevas Ideas, adalah pemimpin organisasi perdagangan manusia. Kejahatan yang dia lakukan berupa pengenaan biaya antara \$8.000 dan \$12.000 per imigran ilegal atau tidak berdokumen yang bermigrasi ke AS (Lemus, 2022).

Kejaksaan Agung tidak menuntut Barahona, tetapi melakukan penyelidikan terbuka tentang sumber pendapatan yang dia miliki beberapa tahun terakhir, yang digunakan untuk membeli mobil mewah, stasiun televisi, dan real estate. Namun, hal tersebut tidak mencegah Nuevas Ideas untuk mengajukan Barahona sebagai calon legislatif pada pemilihan Februari 2021. Partai tersebut memperoleh kemenangan yang salah satunya merupakan hasil negosiasi Luna dan Marroquin untuk menambah dukungan suara dari geng. Jaksa mencatat bahwa rentang waktu 2014 hingga 2019, Barahona adalah rekan dari Los Perrones, kelompok kriminal yang memiliki jaringan lebih luas. Kelompok tersebut dipimpin oleh Wilfredo Antonio Reyes Martínez, Gustavo, dan Carlos Umanzor Flores. Ketiganya telah dijatuhi hukuman atas kasus kejahatan perdagangan manusia dan penggelapan pajak. Los Perrones merupakan perusahaan kriminal yang memiliki jaringan kompleks tanpa komando pusat, tetapi melalui jaringan sel yang berbagi kendali atas perdagangan manusia, narkoba, pencucian uang, dan penghindaran pajak (Lemus, 2022).

2.2 Faktor Penyebab Kejahatan Perdagangan Manusia di El Salvador

2.2.1 Faktor Ekonomi

Tingkat pengangguran tinggi yang tidak diimbangi dengan penciptaan lapangan pekerjaan membuat tingkat kemiskinan menjadi tinggi. Grafik di bawah ini menunjukkan tingkat pengangguran di El Salvador dari tahun ke tahun. Data menunjukkan bahwa pengangguran meningkat secara signifikan pada tahun 2021, yakni mencapai 7,2% (Trading Economics, 2022). Kemungkinan disebabkan oleh Pemutusan Hubungan Kerja sepihak karena pandemi *covid-19*. Disamping itu, lapangan pekerjaan informal dan berupah rendah mendominasi negara ini, seperti pertanian, industri, manufaktur, dan pariwisata, yang secara tradisional tidak memiliki upah layak (Decker, 2020). Upah minimum tertinggi El Salvador adalah \$365,00 per bulan (Galdamez., 2022). Namun untuk mendapatkan upah tersebut, mengharuskan seseorang minimal bergelar sarjana.

Grafik 1

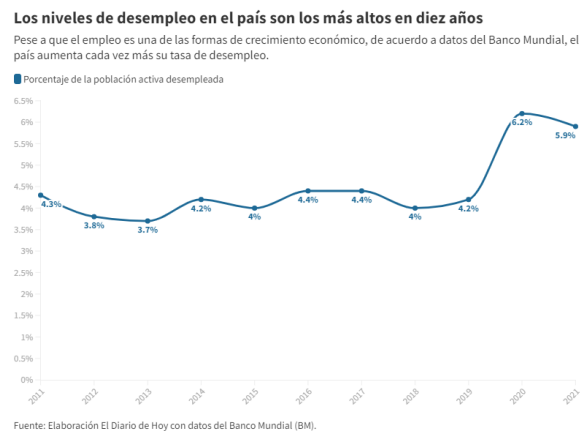


Sumber: Trading Economics (2022)

Berdasarkan data, El Salvador menghasilkan 11.000 lowongan pekerjaan per tahun. Namun posisi tersebut tidak seimbang dengan jumlah pengangguran dan pendatang yang dideportasi, yang berjumlah 60.000 individu (Trajono,

2020). Masyarakat El Salvador mengalami deportasi massal dari AS, karena dahulu perpindahannya dilakukan secara ilegal. Deportasi massal akan meningkatkan jumlah tenaga kerja di El Salvador. Apabila tidak diimbangi dengan penciptaan lapangan pekerjaan, maka akan berdampak pada tingginya tingkat pengangguran. Data statistik di bawah ini menunjukkan perkiraan angka pengangguran yang diterbitkan oleh Bank Dunia. Menurut Bank Dunia, sekitar 5,9% usia aktif kerja berstatus sebagai pengangguran pada tahun 2021 (Arevalo, 2022). Jumlah tersebut merupakan peningkatan yang signifikan selama sepuluh tahun terakhir.

Grafik 2

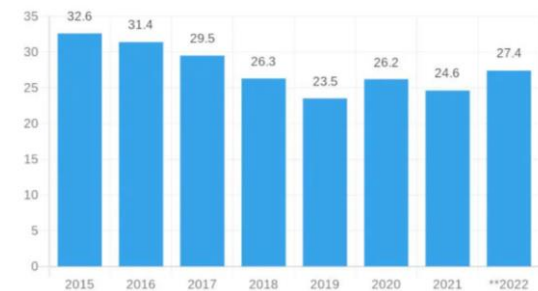


Sumber: World Bank (2022)

Tingginya jumlah pengangguran berpengaruh terhadap peningkatan angka kemiskinan. Grafik di bawah ini menunjukkan angka kemiskinan di El Salvador. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2020, tingkat kemiskinan naik secara signifikan, yaitu 26,2%, yang merupakan dampak dari terbatasnya lapangan pekerjaan, dibarengi dengan gaji rendah dan diperburuk oleh pandemi. Per tahun 2022, ada sekitar 1.734.679 penduduk Salvador hidup dengan kurang dari \$5,50 per hari, yang merupakan standar kemiskinan

internasional. Jumlah tersebut meningkat 2,8% dari tingkat kemiskinan tahun 2021. Kesulitan semakin dirasakan di komunitas miskin pedesaan, dimana sebanyak 45% orang Salvador tinggal di pedesaan yang mayoritas bekerja sebagai buruh dan petani. Sementara, upah yang didapatkan dari pekerjaan mereka adalah kurang dari \$243,46 per bulan (Galdamez., 2022).

Grafik 3



Sumber: World Data Atlas (2022)

Faktor ekonomi memberikan gambaran bahwa pengangguran, terbatasnya lapangan pekerjaan, dan keputusan pekerjaan membuat pilihan hidup masyarakat El Salvador menjadi sempit. Fakta menunjukkan kemiskinan akan berpengaruh pada kualitas pendidikan anak Salvador. Ketika sumber pendapatan orang tua rendah, mengakibatkan mereka tidak mampu memberikan akses pendidikan yang layak kepada anak. Sebaliknya, anak justru dibutuhkan oleh orang tua untuk membantu mereka mencari sumber uang tambahan, ini terutama terjadi pada komunitas miskin dan pedesaan, seperti departemen Moraza'n, Cabanas, dan La Union.

Data membuktikan bahwa 1,8 juta anak dipekerjakan pada tahun 2021. Sejalan dengan data tersebut, menurut hasil Survei Rumah Tangga Multiguna Tahunan El Salvador, sebanyak 88.300 anak usia 5-17 tahun bekerja di tahun 2021 (U.S Department of Labor, 2021). Sementara itu, angka sekolah anak

Salvador justru rendah, yakni hanya satu dari tiga anak lulus kelas sembilan, dan hanya satu dari lima anak yang lulus sekolah menengah atas, atau dapat dikatakan lebih dari 60% anak tidak menyelesaikan sekolah menengah. Menurut UNICEF, anak yang menyelesaikan pendidikan hingga kelas enam sekolah dasar hanya kurang dari 50% (Galdamez., 2022). Akibatnya, sekitar 20% anak diatas usia 10 tahun mengalami buta huruf (Decker, 2020). Data tabel dibawah diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan El Salvador, yakni tentang tingkat pendaftaran khusus berdasarkan kelas, membenarkan rendahnya pendidikan anak di El Salvador (Ministerio de Educacion, 2022).

Tabel 1. Tingkat Pendaftaran Khusus Berdasarkan Kelas

* Ministerio de Economía, Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC), El Salvador: Estimaciones y proyecciones de población nacional 2005 – 2050 departamental 2005-2025 (revisión 2014 y 2021).

Nacional										
Grado	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Lactantes	0.2%	0.3%	0.2%	1.2%	1.9%	1.4%	2.3%	1.5%	1.6%	
1 a < 2 años	0.4%	0.7%	0.6%	2.8%	3.6%	2.6%	3.2%	3.4%	3.0%	
2 a < 3 años	0.9%	1.2%	1.1%	4.0%	5.7%	4.0%	4.5%	4.4%	5.0%	
3 a < 4 años	2.4%	3.0%	3.0%	6.7%	8.8%	5.7%	6.2%	5.6%	6.7%	
Parv. 4 años	25.1%	25.4%	25.2%	24.0%	26.3%	22.7%	21.9%	16.6%	20.0%	
Parv. 5 años	45.2%	44.4%	43.5%	43.4%	43.8%	43.1%	40.6%	36.3%	37.1%	
Parv. 6 años	58.9%	56.5%	54.9%	54.2%	55.3%	55.1%	55.6%	49.4%	51.7%	
1er grado	60.2%	63.3%	60.8%	57.6%	58.8%	58.3%	57.3%	56.8%	53.2%	
2do grado	51.8%	52.3%	55.4%	51.6%	52.0%	52.7%	53.5%	54.0%	50.8%	
3er grado	48.8%	48.5%	48.8%	50.5%	50.0%	49.9%	50.8%	51.9%	49.7%	
4to grado	47.4%	46.3%	45.8%	44.5%	49.3%	48.6%	48.2%	49.5%	49.0%	
5to. Grado	45.4%	44.6%	43.7%	42.0%	44.1%	48.0%	46.9%	46.9%	46.9%	
6to grado	44.9%	42.8%	42.3%	40.1%	41.6%	43.2%	46.6%	45.9%	44.6%	
7mo grado	42.2%	40.9%	39.8%	37.5%	38.8%	40.0%	41.1%	44.5%	43.0%	
8vo grado	40.0%	38.1%	37.4%	34.5%	35.9%	37.2%	37.9%	39.5%	40.9%	
9no grado	35.2%	36.8%	35.1%	32.5%	33.7%	34.7%	35.4%	36.5%	36.3%	
1er Año de Bachillerato	28.7%	29.7%	30.6%	28.0%	29.4%	29.6%	30.4%	31.0%	31.8%	
2do Año de Bachillerato	23.9%	23.9%	24.5%	25.3%	25.5%	26.8%	26.7%	27.5%	26.5%	

Sumber: Ministerio de Educacion (2022)

Faktor ekonomi menunjukkan bahwa kemiskinan dapat mempengaruhi kualitas pendidikan. Terbatasnya akses pendidikan membuat pengetahuan individu menjadi sangat rendah. Hal ini tidak terjadi pada anak saja, melainkan perempuan dan laki-laki dewasa yang tidak memiliki akses pendidikan cukup. Akibatnya, orang akan mudah untuk ditipu dan ditawarkan pekerjaan-pekerjaan ilegal. Keinginan masyarakat El Salvador untuk mendapatkan sumber keuangan yang lebih besar membuat sebagian orang terjerumus ke

dalam praktik kejahatan perdagangan manusia. Lapangan pekerjaan yang sedikit, ditambah dengan upah kerja rendah membuat pekerjaan ilegal menjadi sangat menarik, seperti penjualan narkoba, *stripping*, pelayanan di bar atau club, penipuan, penculikan, dan lain-lain, yang sering ditawarkan oleh geng.

Praktik-praktik seperti itu sering memposisikan masyarakat ke dalam posisi yang rentan terhadap kejahatan transnasional, seperti perdagangan manusia. Selain itu, anak yang berkeliaran di jalan dengan tujuan untuk mencari pekerjaan, menjadi sasaran juga bagi jaringan perdagangan manusia. Anak-anak akan direkrut dan dipersenjatai untuk melakukan kegiatan ilegal. Orang tua dan anak, terutama yang masuk ke dalam komunitas miskin sangat rentan menjadi subjek eksploitasi seksual dan kerja paksa geng di El Salvador.

2.2.2 Faktor Migrasi Tidak Teratur

Migrasi dan pembangunan ekonomi terkait erat. Lowongan pekerjaan yang terbatas akan berdampak pada tingginya angka pengangguran. Maka besar kemungkinan akan berpengaruh terhadap angka kemiskinan. Akibatnya, migrasi menjadi salah satu jalan keluar dari siklus permasalahan itu. Diperkirakan sebanyak 89% orang Salvador bermigrasi ke AS dan Meksiko. Sekitar dua pertiga (67%) berusia 26 hingga 45 tahun dan 21% berusia antara 18 hingga 25 tahun (Trajono, 2020). Namun, migrasi dilakukan secara ilegal atau tanpa dokumen, melalui jalur darat dengan rute migrasi yang tidak teratur.

Apa yang dipahami sebagai migrasi tidak teratur adalah perpindahan penduduk (keluar dan masuk) dari suatu negara selama periode waktu tertentu yang dilakukan tidak teratur melalui titik lintas tidak resmi. Tujuan untuk mencari kehidupan yang lebih layak sekali lagi menemui hambatan dan harus

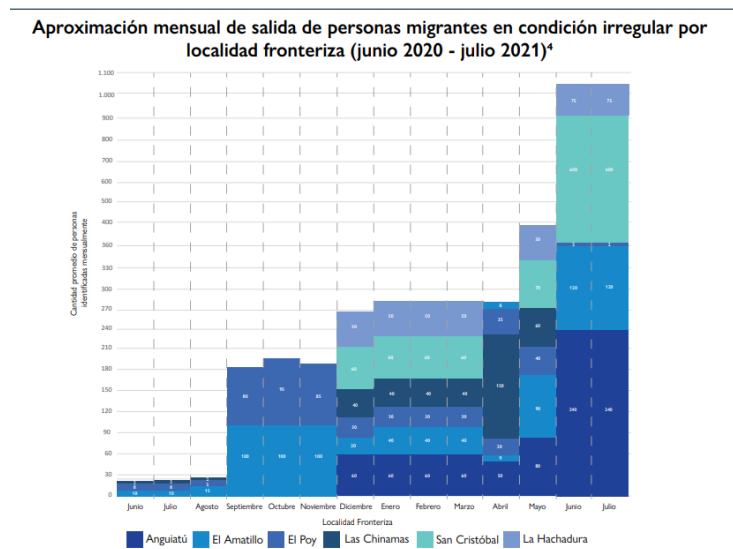
gagal, karena mereka dideportasi secara massal untuk kembali ke El Salvador. Deportasi massal ini berpengaruh pada keadaan ekonomi yang semakin terpuruk, karena tenaga kerja domestik yang membengkak. Bank Dunia memperkirakan sebanyak 75.000 orang tidak mendapatkan peluang pekerjaan di tahun 2020 (Arevalo, 2022).

Faktor migrasi membuktikan secara tidak langsung bahwa posisi El Salvador dalam kejahatan perdagangan manusia adalah sebagai negara sumber. Masyarakat yang dideportasi kembali ke negara ini membutuhkan pekerjaan yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, sedangkan untuk mendapatkan pekerjaan sangat sulit. Berdasarkan sumber, sebanyak 40% masyarakat yang dideportasi berusaha untuk kembali ke AS dan 7% akan berusaha bermigrasi ke negara lain, sedangkan sebanyak 54% akan tetap tinggal di El Salvador (Trajono, 2020). Individu yang melakukan migrasi tidak teratur sangat rentan terkena pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), yakni termasuk diskriminasi dan eksploitasi. Karena migrasi dilakukan dengan tanpa dokumen, sehingga individu ini tidak memiliki perlindungan hukum di negara penerima.

Absennya perlindungan hukum atas individu, membuat dirinya tidak memiliki jaminan keselamatan. Akibatnya, ketiga kelompok di atas rentan untuk dieksploitasi. Eksploitasi merupakan manifestasi dari kejahatan perdagangan manusia. Seringkali migrasi jenis ini difasilitasi oleh geng atau jaringan kejahatan terorganisir, oleh karena nya kondisi ini dilihat sebagai peluang penghasilan mereka (CONNA, 2019). Kelompok pertama dan kedua akan ditawarkan perjalanan migrasi yang aman dan murah, tetapi kemungkinan

untuk diperdagangkan dan dieksploitasi tenaga serta kemampuannya sangat besar. Sedangkan kelompok ketiga menjadi sasaran bagi praktik penipuan dan ancaman yang bertujuan untuk dieksploitasi juga di dalam negaranya. Kemungkinan tersebut diperkuat dengan data jumlah rata-rata orang yang diidentifikasi keluar dari El Salvador setiap bulan (Juni 2020-Juni 2021) di bawah ini.

Grafik 4



Sumber: Organización Internacional para *las Migraciones* (2021)

Data di atas diterbitkan oleh Organización Internacional para *las Migraciones* (OIM) dalam laporan “*Evaluación de Flujos Migratorios Irregulares Y Seguimiento A la Movilidad en Localidades Fronterizas Bajo el Contexto de la Covid-19 El Salvador - Reporte Anual Junio 2020-Julio 2021*”. Berdasarkan data di atas, menunjukkan bahwa La Hachadura menjadi kota perbatasan dengan arus keluar migran terbanyak, yakni sekitar 1.458 orang dari El Salvador. Posisi berikutnya, diikuti oleh kota Anguiatú dan El Amatillo.

Menurut laporan, setiap bulan ada 2 dari 600 orang diidentifikasi keluar secara tidak teratur (OIM, 2021).

Selain wilayah yang telah ditunjukkan oleh data di atas, wilayah pemulangan juga diketahui memiliki potensi terjadinya kejahatan perdagangan manusia. Tercatat area pemulangan individu yang dideportasi adalah ke wilayah San Salvador sebanyak 15%, sekitar 12% ke Usulután, San Miguel sebanyak 11%, dan ke departemen lain sekitar 62% (Trajono, 2020). Beberapa wilayah pemulangan tersebut merupakan daerah yang rentan kejahatan perdagangan manusia. Dibuktikan pada tahun 2021, sebanyak 16 kasus kejahatan perdagangan manusia terjadi di San Miguel, dan 9 kasus diidentifikasi terjadi di San Salvador (Observatorio, 2021). Inilah penjelasan yang menunjukkan bahwa posisi El Salvador dalam kejahatan perdagangan manusia sebagai negara sumber atau asal.

2.3 Ratifikasi El Salvador terhadap UNTOC

Salah satu negara yang melakukan ratifikasi terhadap UNTOC dan *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children*. Negara ini melakukan ratifikasi perjanjian pada 18 Maret 2004. Untuk penandatanganan masing-masing dilakukan pada 14 Desember 2000 dan 15 Agustus 2002. Setiap Negara Pihak memiliki hak untuk melakukan reservasi terhadap suatu pasal. Berkaitan dengan hal tersebut, El Salvador memutuskan untuk melakukan reservasi terhadap satu ayat, masing-masing dalam UNTOC dan Protokol nya.

Berdasarkan sumber, El Salvador tidak menganggap dirinya terikat oleh pasal 35 ayat 2 pada UNTOC dan pasal 15 ayat 2 pada *Protocol to Prevent, Suppress and*

Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children (United Nations, 2023). Pasal 35 UNTOC dan pasal 15 Protokol di atas sama-sama menjelaskan tentang mekanisme penyelesaian sengketa mengenai interpretasi pasal dan penerapan konvensi. Reservasi tersebut dilakukan karena El Salvador tidak mengakui yurisdiksi wajib dari Mahkamah Internasional. Artinya, ketika terjadi sengketa dalam interpretasi pasal atau penerapan konvensi, El Salvador tidak akan merujuk permasalahan ke arbitrase ataupun Mahkamah Internasional, melainkan akan berupaya menyelesaikannya dengan negosiasi. Keputusan tersebut diambil dengan menggunakan dasar dari pasal 35 ayat 3 UNTOC dan pasal 15 ayat 3 *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children* yang menyatakan bahwa setiap Negara Pihak berhak untuk tidak terikat dengan ayat 2 pada masing-masing pasal (*Overheid Treaty Database*).

Ratifikasi instrumen yang dilakukan oleh El Salvador menandakan adanya komitmen untuk membentuk serangkaian strategi kebijakan dan tindakan untuk melawan kejahatan transnasional terorganisir, termasuk dalam hal ini perdagangan manusia. Tindakan yang dimaksud dapat diimplementasikan seperti penyesuaian tindak pidana domestik (berdasar pada norma-norma perjanjian), mengadopsi kerangka baru dan luas untuk mekanisme ekstradisi, kerja sama penegakan hukum dengan lembaga terkait, kerja sama dengan LSM atau organisasi non-pemerintah, dan bantuan teknis dan pelatihan untuk meningkatkan sumber daya otoritas nasional (*UNODC, n.d.*).

United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC) dibentuk pada bulan Desember 2000, di Palermo, Italia (*UNODC, n.d.*). Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat internasional memiliki keinginan

politik untuk menghadapi tantangan global dengan tanggapan global. Kejahatan transnasional terorganisir yang merupakan ancaman lintas batas negara harus dihadapi dengan penegakan hukum internasional juga. Jika penjahat memanfaatkan globalisasi, keterbukaan perbatasan, kemajuan teknologi, dan pasar bebas untuk melanggengkan kejahatannya, maka negara-negara harus bersatu untuk membentuk sebuah instrumen yang bisa menahan kejahatan transnasional, seperti perdagangan manusia, korupsi, kerja paksa, perdagangan senjata ilegal, dan lain-lain. Aktivitas kejahatan tersebut tumbuh subur, terutama di negara-negara miskin dan berkembang.

Salah satu protokol yang melengkapi UNTOC adalah *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children*. Protokol tersebut dibentuk dengan mempertimbangkan fakta bahwa tidak ada instrumen universal yang mengatur penanganan semua aspek perdagangan orang, meskipun instrumen internasional yang berisi aturan dan tindakan praktis untuk memerangi eksploitasi orang tersedia (*United Nations Office on Drugs and Crime, 2004*). Keprihatinan menjadi orientasi bagi negara anggota untuk memenuhi kekosongan UNTOC, terutama untuk melindungi kelompok masyarakat rentan, seperti perempuan dan anak-anak. Negara Pihak Perjanjian percaya bahwa upaya untuk melengkapi UNTOC dengan penyusunan Protokol akan bermanfaat untuk mencegah dan memerangi kejahatan yang dimaksud. Sifat kejahatan yang melewati batas negara, semakin memperkuat kepercayaan bahwa diperlukan pendekatan internasional yang komprehensif bagi negara asal, transit, dan tujuan untuk bersama-sama mencegah kejahatan perdagangan manusia, memberikan hukuman yang setara kepada para penjahat, dan untuk melindungi korban.

Kejahatan perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak-anak, baik untuk kerja paksa dan eksploitasi seksual, adalah bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Korban kejahatan ini biasanya dihadapkan pada sedikitnya pilihan hidup yang dikarenakan kondisi sosial dan ekonomi di negara-negara asal. Maka dari itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa mendesak negara anggota konvensi untuk segera melakukan ratifikasi, tidak hanya pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Kejahatan Transnasional Terorganisir, tetapi sekaligus *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children*. Sehingga negara anggota dapat menggunakan konvensi dan protokolnya sebagai dasar untuk membentuk upaya kolektif bersama dalam memerangi berbagai macam kejahatan transnasional. Upaya kolektif yang dimaksud dapat diimplementasikan dalam peningkatan kerja sama internasional, yang harapannya dapat menjamin keamanan masyarakat, terutama kelompok rentan (*UNODC, n.d.*).

2.4 Upaya Penanganan Perdagangan Manusia oleh Pemerintah El Salvador (2019-2021)

Untuk menangani kejahatan perdagangan manusia, pada tahun 2005 pemerintah membentuk Komite Nasional Anti-Perdagangan Manusia, yang kemudian diganti menjadi Dewan Nasional Anti-Perdagangan Manusia pada tahun 2011. Dewan terdiri dari para pimpinan lembaga Negara, seperti Kementerian Dalam Negeri dan Pembangunan Wilayah (MIGOB), Kementerian Pariwisata (MITUR), Kementerian Kesehatan (MINSAL), Kementerian Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial (MTPS), Kementerian Kehakiman dan Keamanan Publik (MJSP), Kementerian Luar Negeri (MRREE), Kementerian Pendidikan (MINED), Kejaksaan Agung Republik (FGR), Institut Pengembangan Wanita Salvador

(ISDEMU), Institut Salvador untuk Pengembangan Integral Anak dan Remaja (ISNA), Polisi Sipil Nasional (PNC), Dewan Nasional untuk Anak dan Remaja (CONNA), dan Direktorat Jenderal Migrasi dan Orang Asing (DGME) (CONNA, 2019).

Pertemuan Dewan diadakan setiap tiga bulan sekali (UN Women, 2012). Pada tahun 2012, Dewan ini menerapkan Kebijakan Nasional Anti Perdagangan Orang, yang bertujuan untuk membentuk basis yang berupa panduan pendekatan komprehensif terhadap kejahatan, memberikan bimbingan kepada lembaga yang bertanggung jawab atas tindakan dan pelaksanaannya. Dewan ini juga ditetapkan untuk membuat dan melaksanakan rencana nasional, dan mempromosikan proposal untuk Undang-Undang Komprehensif Anti Perdagangan Manusia. Unit Khusus melawan Perdagangan Manusia juga dibentuk dan dioperasikan oleh pemerintah untuk memberantas total kejahatan, yang diletakkan di Salvadoran Institute for the Comprehensive Development of Children and Adolescents (ISNA), National Civil Police (PNC), Kantor Kejaksaan Agung Republik (FGR), Salvadoran Institute for the Development of Women (ISDEMU), Kementerian Luar Negeri (MRREE) dan Direktorat Jenderal Migrasi dan Orang Asing (DGME) (CONNA, 2019).

Kerangka hukum yang telah dimiliki oleh pemerintah untuk menghukum tindak kejahatan perdagangan manusia dan melindungi korbannya adalah *Special Law Against Human Trafficking (2014) (Ley Especial en contra de la Trata de Personas (2014))*. Undang-Undang ini bertujuan untuk mendeteksi, mencegah, menuntut, menghukum pelaku, dan memberikan perlindungan serta restitusi hak-hak korban. Hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan perdagangan manusia adalah 10 hingga 14 tahun, dan dapat meningkat 16 tahun hingga 20 tahun

apabila pelaku terbukti menggunakan kekerasan, paksaan, dan penipuan. Kerangka hukum yang kedua adalah *the Inter-Institutional Action Protocol for the Immediate Comprehensive Care of Victims of Human Trafficking* (2018) (*Protocolo de actuación interinstitucional para la atención integral inmediata de las víctimas de trata de personas* (2018)). Protokol berisi cakupan kompetensi fungsional masing-masing lembaga yang membentuk Dewan Nasional Anti Perdagangan Manusia, dan instrumen peraturan yang mengatur mekanisme rute perawatan dan perlindungan yang komprehensif yang diberlakukan di seluruh wilayah nasional untuk menjamin HAM, mencegah viktimisasi ulang dalam proses perawatan dan perlindungan (CONNA, 2019).

Setelah Bukele berkuasa, dia membuat kebijakan keamanan, yang diumumkan sebagai Rencana Kontrol Wilayah (*Territorial Control Plan*). Kebijakan tersebut menggunakan biaya \$575 juta untuk periode 2019-2021. Pejabat pemerintah menyatakan bahwa rencana ini terdiri dari tujuh “fase”, namun baik diplomat maupun perwakilan masyarakat sipil, tidak pernah melihat dokumen yang merinci aspek-aspek dari Rencana Kontrol Teritorial. Akan tetapi, pejabat pemerintah menyebutkan bahwa salah satu fase dalam rencana tersebut akan berfokus pada rehabilitasi anggota geng. Kebijakan ini difokuskan pada penegakan hukum di 22 kotamadya yang diprioritaskan. Langkah-langkahnya termasuk mengerahkan polisi dan patroli militer sebanyak 40.000 pasukan secara permanen, menyediakan peralatan pribadi baru untuk pasukan keamanan, dan penahanan masal (UNHCR, 2021).

Langkah di atas merupakan bentuk implementasi pemerintah terhadap Pasal 27 tentang pengalokasian personel dan sumber daya yang dibutuhkan untuk

memerangi kejahatan perdagangan manusia dalam *Special Law Against Human Trafficking*. Pemerintah juga memperketat kontrol komunikasi dan aliran uang di penjara. Keberhasilan terbukti pada pernyataan otoritas penjara yang mengungkapkan bahwa pada akhir 2019, mereka berhasil memutuskan semua komunikasi tahanan dengan dunia luar, yang mana dapat memblokir perintah dari para pimpinan geng di penjara. Selain itu, Bukele memodernisasi peralatan dan teknologi pasukan keamanan. Akan tetapi, proyek tersebut bergantung pada pinjaman dari Bank Amerika Tengah sebanyak \$109 juta untuk integrasi ekonomi, dan memerlukan persetujuan dari Majelis legislatif yang dikendalikan oleh oposisi. Hasilnya majelis menolak ajuan tersebut, dan oleh karena itu ketegangan meningkat yang memicu krisis kelembagaan pada Februari 2020 (International Crisis Group, 2020).

Pada tahun 2019, pemerintah juga membentuk Unit Rekonstruksi Struktur Sosial di Badan Kesejahteraan Sosial Pemerintah, yang dipimpin oleh Carlos Marroquin. Unit ini bertujuan untuk mengatasi kondisi dasar yang menyebabkan kaum muda bergabung dalam geng, seperti kesempatan kerja yang langka, marginalisasi ekonomi, pengucilan sosial, yang pada akibatnya akan menjadi korban perdagangan manusia. Marroquin menyebutkan bahwa pekerjaannya akan diperluas hingga lebih ke 60 kota madya yang dianggap sebagai wilayah tempat rekrutmen geng. Upaya utama dari unit ini adalah pembangunan pusat berdinding kaca, atau disebut dengan “kubus”, yang akan diletakkan di komunitas miskin. (International Crisis Group, 2020)

Tujuan pembangunan kubus adalah penyediaan ruang yang aman untuk hiburan dan pelatihan bagi anak muda. Ini diharapkan dapat mencegah anak

direkrut oleh geng, karena waktu nya banyak dihabiskan untuk berpartisipasi dalam kegiatan daripada berkeliaran di jalanan. Pada tahun ini telah ada 75 gangster yang bergabung dalam kegiatan ini. Namun, biaya pembangunan kubus yang sangat tinggi meningkatkan keraguan keberlanjutan proyek dalam jangka panjang. Satu kubus diketahui membutuhkan dana sekitar \$700.000 untuk pembangunan, yang ditambah dengan \$350.000 tahunan untuk keamanan, personel, tagihan, dan pemeliharaan. Rencana pinjaman yang ditolak oleh Majelis Legislatif, membuat Bukele menempatkan personel militernya di Majelis pada Februari tahun 2020 untuk memaksa persetujuan pinjaman (International Crisis Group, 2020).

Pada tahun 2019, pemerintah melalui Satuan Khusus Perdagangan Orang dan Lalu Lintas Orang Secara Ilegal Kejaksaan Agung (La Unidad Especializada de Trata y Tráfico Ilegal de Personas de la Fiscalía General de la República), melaporkan bahwa beberapa jam terakhir diperintahkan untuk menangkap 13 orang atas kejahatan seksual, yang termasuk ke dalam kasus perdagangan manusia. Investigasi pelaku dilanjutkan oleh Unit Anti-Perdagangan Manusia PNC. Dalam kesaksiannya, salah satu remaja menjadi sasaran tindakan seksual, dimana ia dibawa ke berbagai bagian negara hingga ke Guatemala. Sementara itu, korban lain dipaksa untuk berhubungan dengan orang-orang yang tinggal di Departemen Chalatenango. Pelaku, termasuk subjek yang membayar untuk menyerahkan korban, akan dituntut atas kejahatan perdagangan manusia, pelecehan seksual, dan pemerkosaan berlebihan (Villeda, 2019).

Pemerintah menambah 11 jaksa baru yang khusus menangani kasus perdagangan manusia pada tahun 2019. Peletakkan jaksa baru ini berlokasi di daerah terpencil yang dianggap sebagai wilayah rawan kejahatan perdagangan

manusia, yakni San Miguel dan Ahuachapan. Keberhasilan terlihat pada otoritas yang menyelidiki sekitar sebanyak 80 kasus, diantaranya ada 77 kasus perdagangan seks, satu kasus pengemis paksa dan dua kasus kerja paksa. Masih di tahun yang sama, pihak berwenang menuntut sembilan orang, (delapan perdagangan seks, satu kerja paksa), dan menghukum 12 orang (tiga untuk perdagangan seks). Selain itu, Kejaksaan Agung bersama dengan Kepolisian, LSM, organisasi internasional, dan Dewan anti-perdagangan manusia, membantu 111 korban dengan penginapan sementara, perawatan psikologis, pelatihan dan penempatan kerja (U.S Embassy, 2020). Pemberian tempat tinggal sementara bagi korban perdagangan manusia adalah bentuk implementasi pemerintah dalam Pasal 64 dalam *Special Law Against Human Trafficking* tentang penyediaan fasilitas sementara untuk korban.

Pada tahun 2020, upaya pemberantasan kejahatan perdagangan manusia terus dilakukan oleh pemerintah. Hal tersebut dibuktikan dengan peletakan sebanyak 25 anggota staf aktif di Unit Anti-Perdagangan Manusia PNC dan 15 jaksa di Unit Penuntutan Anti-Perdagangan. Penambahan anggota berdampak pada keberhasilan penuntutan sebanyak 39 kasus perdagangan seks dan menghukum 12 pelaku kejahatan. Selain itu, Pemerintah memindahkan Unit Penuntutan Anti-Perdagangan Manusia ke sebuah bangunan baru yang dapat memungkinkan untuk melakukan wawancara dengan nyaman dan baik, termasuk ruangan khusus anak dan saksi muda. Pemindahan dilakukan karena keterbatasan sistem manajemen kasus elektronik yang menghambat upaya pengumpulan, penyebaran, dan analisis informasi penegakan hukum. Dengan begitu, pemerintah dapat memberikan perlindungan saksi dan dukungan kepada korban perdagangan yang teridentifikasi, termasuk merahasiakan identitas korban di pengadilan dan memberikan izin untuk

memberikan kesaksian melalui telekonferensi atau deposisi (U.S Department of State, 2021).

Pemberantasan kejahatan perdagangan manusia tidak dapat diupayakan sendiri oleh pemerintah, melainkan membutuhkan kerjasama dan koordinasi dengan organisasi masyarakat sipil. Salah satu organisasi yang aktif memerangi kejahatan ini adalah Asosiasi Penentuan Nasib Sendiri Wanita Salvador (AS Mujeres), yang telah bekerja sejak tahun 1996. AS Mujeres menyediakan dukungan medis dan psikologis bagi korban kejahatan perdagangan manusia, serta sekutu penting Kantor Kejaksaan Agung dalam hal perlindungan.

Tindakan di atas merupakan bentuk implementasi terhadap Pasal 31 dalam *Special Law Against Human Trafficking* tentang langkah-langkah memberikan perawatan komprehensif segera terhadap korban kejahatan perdagangan manusia. Selain itu, AS Mujeres bekerja sama dengan polisi dan Kejaksaan dalam hal pemindahan korban dari satu tempat ke tempat lain, yang dilakukan dengan cara paling rahasia, terutama ketika kasus peradilan terhadap jaringan kejahatan terorganisir sedang berlangsung. Dahulu, asosiasi ini juga memberikan perlindungan bagi perempuan korban, namun sekarang dilakukan oleh kantor kejaksaan. AS Mujeres menyediakan perawatan bagi korban, seperti bantuan medis yang menggabungkan teknik non-tradisional (biomagnetisme) yang dilakukan oleh dokter spesialis di bidang ini, dukungan psikologis, serta aromaterapi dan pijat. Dari pengalaman yang telah didapatkan oleh asosiasi, kombinasi ketiga Teknik tersebut membuat pemulihan menjadi lebih efektif dan perawatan menjadi lebih integral. Pada tahun 2019, AS Mujeres sedang menawarkan dukungan dan perawatan kepada lima perempuan yang menjadi korban kejahatan (Ayala, 2019).

Upaya pencegahan perdagangan manusia juga dilakukan melalui kerja sama internasional pada tahun 2020. El Salvador, Honduras, dan Guatemala yang membentuk Kawasan Segitiga Amerika Tengah Utara sedang memiliki permasalahan yang sama, yakni peningkatan kasus eksploitasi anak secara *online* sebesar 140 persen yang merupakan dampak dari pandemic covid-19. Pandemi membuat seluruh aktifitas, termasuk bersekolah dilakukan secara daring. Kegiatan tersebut meningkatkan paparan anak terhadap internet, membuat mereka lebih rentan terkena pelecehan seksual secara *online*. Jenis kejahatan ini termasuk ke dalam kejahatan perdagangan manusia. Mekanisme eksploitasi diawali dengan anak dipaksa untuk melakukan *streaming online* pada *dark web* yang mengarah pada pelecehan seksual. Pembuat materi seksual anak online akan mendapatkan penghasilan dari aktivitas tersebut (Trajano, 2018). Peningkatan kasus terjadi pada periode tahun 2019-2021. International Center for Missing and Exploited Children (ICMEC) menjadi fasilitator pembentukan perjanjian ketiga negara.

Penandatanganan Perjanjian Tiga Negara dilakukan oleh masing-masing Wakil Presiden, yang bertujuan untuk bersama-sama memerangi kejahatan serta melindungi anak-anak dari eksploitasi dan pelecehan seksual secara *online*. Kerja sama ini merupakan bentuk implementasi pemerintah terhadap Pasal 26 (b) dalam *Special Law Against Human Trafficking* tentang upaya pencegahan perdagangan manusia melalui pembentukan kesepakatan bersama dengan negara lain. ICMEC akan bekerja sama dengan unit anti-perdagangan manusia yang ada di ketiga negara tersebut. Melalui perjanjian ini, ICMEC juga akan melakukan peningkatan kapasitas jaksa, polisi, dan anggota peradilan di setiap negara. Hal tersebut dilakukan dengan memberikan pelatihan, mengadakan lokakarya, memfasilitasi

pembuatan prosedur untuk menerapkan teknologi baru guna mendeteksi dan menanggapi materi pelecehan seksual anak secara online. ICMEC sendiri merupakan penerima hibah dari *End Violence Partnership*. Dukungan kemitraan, membantu ICMEC untuk bergabung dengan Child Helpline International, yang dimanfaatkan untuk mempromosikan dukungan *end-to-end* kepada anak-anak yang mengalami eksploitasi dan pelecehan seksual secara online (End Violence, 2021).

Pada 11 Mei 2020, pemerintah berkoordinasi dengan salah satu Organisasi Regional, the United Nations Office on Drugs and Crime for Central America and the Caribbean (UNODC ROPAN). Kerja sama dijalin dengan tujuan untuk memfasilitasi pelatihan tentang perdagangan orang kepada hakim dan jaksa. Koordinasi pelatihan dilakukan dengan Dewan Kehakiman Nasional, Sekolah Pelatihan Kejaksaan, Save the Children, dan IOM. Cakupan materi pelatihan yakni elemen objektif dari sifat kriminal perdagangan manusia, mekanisme perawatan korban, sistem pengadilan kasus, dan bagaimana menangani bukti dalam persidangan pidana. Menurut laporan, sebanyak 335 petugas penegak hukum garis depan di wilayah perbatasan mendapatkan pelatihan secara daring mengenai identifikasi dan penyelidikan dugaan perdagangan manusia (U.S Department of State, 2021).

Pelatihan di atas diberikan oleh pemerintah sebagai bentuk implementasi Pasal 26 (a) dalam *Special Law Against Human Trafficking* tentang pemberian pelatihan secara berkala kepada pejabat terkait. Komitmen UNODC ROPAN dalam memerangi kejahatan perdagangan orang dilakukan dengan memberikan dukungan pada Polisi Sipil Nasional (PNC) dan memberikan bantuan teknis, logistik ke wilayah investigasi di El Salvador. Laporan menyatakan bahwa pada periode waktu

tersebut, tim investigasi PNC Persatuan melakukan penangkapan administratif terhadap seekor anjing hutan Salvador yang diduga terlibat dalam aktivitas perdagangan manusia di departemen La Union, kotamadya yang terletak di wilayah perbatasan dengan Honduras (UNODC ROPAN, 2020).

Upaya pemberantasan kejahatan perdagangan manusia kembali dilakukan oleh El Salvador, Honduras, dan Guatemala melalui kerja sama internasional. Pada 10 Desember 2021, yang diperingati sebagai Hari Hak Asasi Manusia Internasional, ketiga Wakil Presiden dari Kawasan Segitiga Amerika Tengah Utara itu kembali bertemu. Bersamaan dengan hal tersebut, ketiga negara menandatangani Deklarasi Niat Baik (*Declaración de Buena Voluntad*) di kota Antigua, Guatemala. Dibawah payung Deklarasi Niat baik, negara saling berkoordinasi untuk menciptakan strategi dalam menghadapi model baru perdagangan manusia, pencucian uang, penyelundupan migran, dan kejahatan terorganisir lainnya. Selain itu, deklarasi ini menekankan pentingnya kerja sama internasional, dan penetapan langkah-langkah perlindungan internasional, serta permintaan suaka atau pengungsian (SICA, 2021).

Pada tahun 2021, pihak berwenang juga menyelidiki kasus perdagangan manusia sebanyak 45 kasus, termasuk diantaranya 40 kasus perdagangan seks dan lima kasus kerja paksa. Penuntutan terhadap 31 orang dalam 12 kasus juga dilakukan. Selain itu, sebanyak 29 pelaku kejahatan dijatuhi hukuman oleh pihak berwenang. Atas dukungan dari donor asing, pemerintah berhasil membuka lima Pusat Peluang dan Kesehatan Perkotaan. Tempat itu digunakan untuk memberikan akses pendidikan dan rekreasi kepada anak-anak yang berpotensi dieksploitasi oleh geng, terutama di wilayah kejahatan tinggi (U.S Embassy In El Salvador, 2022).

Upaya penuntutan, perlindungan, dan pencegahan terus dilakukan oleh pemerintah pada tahun 2022. Polisi menyelidiki 36 kasus perdagangan (34 perdagangan seks, 2 perdagangan tenaga kerja) yang melibatkan 13 tersangka. Penuntutan dilakukan oleh pemerintah terhadap tersangka yang jumlahnya tidak diketahui dalam dua kasus perdagangan. Dibawah gabungan undang-undang perdagangan seks dan penyerangan seksual, Otoritas keamanan menghukum 10 orang dalam tiga kasus perdagangan seks. Pelaku diketahui menerima hukuman delapan hingga 20 tahun penjara (U.S Department of State, 2023).

Pada Oktober 2022, pemerintah melakukan penuntutan terhadap mantan walikota yang diduga memimpin operasi penyelundupan migran, yang rentan terkena kejahatan perdagangan manusia yang parah. Sementara itu, upaya perlindungan yang dilakukan seperti merujuk enam korban perdagangan anak ke tempat penampungan oleh polisi. Laporan dari jaksa menyatakan bahwa sebanyak 16 korban perdagangan seks telah menerima layanan dari pemerintah. Selain itu, pelatihan untuk mengidentifikasi dan membantu korban perdagangan diberikan kepada pekerja sektor perhotelan oleh Dewan anti-perdagangan manusia nasional. Dari dukungan organisasi internasional, pelatihan untuk operator 911 untuk mengidentifikasi korban perdagangan manusia juga diberikan. Pelatihan terhadap petugas imigrasi juga diberikan oleh pemerintah untuk menyaring individu dengan tanda-tanda perdagangan manusia, terutama di wilayah perbatasan, Pelabuhan, dan bandara (U.S Department of State, 2023).

BAB III

ANALISIS KEPATUHAN EL SALVADOR TERHADAP UNTOC DAN PROTOCOL TO PREVENT, SUPPRESS, AND PUNISH TRAFFICKING IN PERSONS, ESPECIALLY WOMEN AND CHILDREN

3.1. Kepatuhan El Salvador terhadap United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC)

Tujuan UNTOC dan *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children*, yang masing-masing tertulis di Pasal 1 dan Pasal 2, menjelaskan bahwa rezim terbentuk dengan tujuan untuk mencegah dan memerangi kejahatan transnasional terorganisir, salah satunya adalah kejahatan perdagangan manusia. El Salvador selaku Negara Pihak Konvensi dan Protokol turut mengupayakan pemenuhan tujuan tersebut. Periode 2019 ditandai sebagai awal kepemimpinan Nayib Bukele di El Salvador. Melihat kejahatan transnasional yang dilakukan oleh MS-13 dan Barrio 18 yang mengancam keamanan Salvadorans, membuat pemerintahan Bukele menerapkan beberapa kebijakan dan upaya untuk mengekang pergerakan geng. Kejahatan yang dilakukan oleh geng termasuk perdagangan manusia.

Untuk upaya pencapaian tujuan rezim, maka pada tahun 2019, pemerintah melakukan penangkapan terhadap 13 orang yang terindikasi melakukan kejahatan perdagangan manusia, yang kemudian dilanjutkan dengan investigasi oleh Unit Anti-Perdagangan Manusia PNC. Satu tahun berikutnya, pemerintah berkoordinasi dengan salah satu Organisasi Regional untuk memberikan pelatihan dan peningkatan kapasitas secara daring kepada 335 petugas penegak hukum garis

depan perbatasan tentang metode identifikasi dan penyelidikan dugaan perdagangan manusia. Pemenuhan tujuan Konvensi dan Protokol terus dilanjutkan pada tahun 2021, yang dibuktikan dengan pembentukan Deklarasi Niat Baik melalui kerja sama internasional antara El Salvador, Honduras, dan Guatemala. Dokumen dijadikan dasar untuk menciptakan strategi bersama dalam menghadapi model baru kejahatan perdagangan manusia. Tindakan-tindakan tersebut sesuai dengan Pasal 1 UNTOC dan Pasal 2 Protokol di atas yang memuat tujuan-tujuan perjanjian, yakni memerangi kejahatan perdagangan manusia dan melindungi korban.

Berdasar pada norma yang tertulis di Pasal 5 pada UNTOC dan Protokol di atas, tentang kriminalisasi, yang mewajibkan pemerintah mengambil tindakan legislatif untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku, El Salvador berupaya untuk mengimplementasikannya. Pada tahun 2019, otoritas terkait melakukan penyelidikan sebanyak 80 kasus, menuntut sembilan orang pelaku kejahatan, dan menjatuhkan hukuman pada 12 orang, tiga diantaranya adalah kejahatan perdagangan seks. Upaya kriminalisasi dilanjutkan pada tahun 2020, yakni sebanyak 29 kasus dituntut atas kejahatan perdagangan seks dan 12 pelaku ditetapkan sebagai tersangka, yang kemudian dijatuhi hukuman. Pejabat yang terindikasi terlibat perdagangan manusia juga ditangkap. Satu tahun berikutnya, polisi menyelidiki 45 tersangka kasus kejahatan, menuntut 31 orang dalam 12 kasus, dan sebanyak 29 pelaku ditetapkan sebagai tersangka serta dipidana. Tindakan-tindakan tersebut dilakukan oleh pemerintah sebagai Negara Pihak Konvensi dan Protokol, khususnya merujuk pada Pasal 5 Protokol di atas, yakni kewajiban pemerintah untuk melakukan tindakan legislatif pada pelaku kejahatan

perdagangan manusia.

Berdasarkan aturan yang tertulis pada Pasal 25 UNTOC dan Pasal 6 Protokol di atas, Negara Pihak memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan dan perlindungan kepada korban kejahatan perdagangan manusia. Dalam Pasal 25 ayat 1 UNTOC, tertulis bahwa Negara Pihak wajib memberikan bantuan dan perlindungan kepada korban kejahatan terorganisir. Sejalan dengan aturan tersebut, Pasal 6 ayat 3 Protokol, menambahkan bahwa bentuk bantuan dan perlindungan dapat diwujudkan dengan kerja sama antara pemerintah dengan organisasi non-pemerintah, atau elemen sipil lainnya untuk mengupayakan penyediaan perumahan yang layak, layanan psikologis, pendidikan, dan hiburan. El Salvador sebagai negara pihak turut mengupayakan pemenuhan aturan dalam pasal-pasal tersebut.

Pada tahun 2019, otoritas penegak hukum bersama dengan Kepolisian, LSM, organisasi internasional, dan Dewan Anti-Perdagangan Manusia memberikan bantuan sebanyak 111 korban dengan penginapan sementara, pelatihan, perawatan psikologis, dan penempatan kerja. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk upaya pemerintah memberikan akses pendidikan dan kesehatan bagi korban. Selain itu, Kantor Kejaksaan Agung selalu berkoordinasi dengan salah satu organisasi non-pemerintah, AS Mujeres, dalam hal penyediaan perawatan kesehatan dan psikologis bagi korban perdagangan manusia, seperti pemberian teknik non-tradisional oleh dokter spesialis. Kedua tindakan tersebut sesuai dengan Pasal 25 Ayat 1 UNTOC dan Pasal 6 Ayat 3 Protokol di atas, yakni pemberian bantuan dan perlindungan kepada korban kejahatan, termasuk kerja sama pemerintah dengan organisasi non-pemerintah dalam pemberian layanan psikologis, pendidikan, dan hiburan.

Pasal 27 Ayat 1 (a) UNTOC dan Pasal 11 Ayat 6 Protokol nya, menjelaskan bahwa salah satu langkah yang efektif untuk mencegah kejahatan perdagangan manusia adalah membangun dan memelihara saluran komunikasi langsung antara otoritas, badan, dan layanan terkait yang kompeten dengan tujuan untuk memfasilitasi pertukaran informasi yang cepat dan aman. Berkaitan dengan upaya pemenuhan kedua pasal tersebut, El Salvador memindahkan kantor Unit Penuntutan Anti-Perdagangan Manusia ke sebuah bangunan baru, termasuk ruangan khusus anak dan saksi muda. Pemindahan tersebut diharapkan dapat meminimalisir hambatan dalam upaya pengumpulan, penyebaran, dan analisis informasi penegakan hukum yang diakibatkan oleh terbatasnya sistem manajemen kasus elektronik.

Pelatihan yang ditujukan untuk petugas penegak hukum juga diatur dalam Pasal 29 UNTOC dan Pasal 10 Protokol nya. Pasal 29 ayat 1 menjelaskan bahwa jaksa, hakim penyidik, petugas imigrasi, petugas bea cukai, dan petugas lain yang bertugas mendeteksi, mencegah, dan mengendalikan kejahatan transnasional terorganisir, wajib mendapatkan pelatihan khusus dari Negara Pihak. Pasal 10 ayat 2 Protokol menambahkan bahwa pelatihan berfokus pada metode pencegahan perdagangan, penuntutan, dan perlindungan hak-hak korban yang didorong dengan kerja sama antara pemerintah dan organisasi non-pemerintah serta elemen masyarakat sipil lainnya. Sebagai Negara Pihak perjanjian, El Salvador mengupayakan pemenuhan kedua pasal melalui kerja sama dengan ICMEC dan UNODC ROPAN. Masing-masing koordinasi bertujuan untuk meningkatkan kapasitas hakim dan jaksa melalui pemberian pelatihan, mengadakan lokakarya, pemberian materi tentang mekanisme perawatan korban, metode mengenai

pengumpulan bukti dalam persidangan pidana, dan sistem pengadilan kasus.

Upaya pencegahan kejahatan perdagangan manusia dapat dilakukan melalui pembangunan ekonomi dan bantuan teknis. Aturan ini tertulis dalam Pasal 30 ayat 2 (b) UNTOC, bahwa Negara Pihak harus bekerja sama dengan organisasi internasional dan regional, terutama dalam meningkatkan bantuan finansial dan material yang ditunjukkan untuk mendukung upaya negara berkembang menghadapi kejahatan transnasional terorganisir, dan khususnya untuk membantu mereka dalam penerapan konvensi ini dengan sukses. El Salvador selaku negara pihak dan sekaligus negara berkembang, mendapatkan dukungan dana dari donor asing yang dimanfaatkan untuk membangun lima Pusat Peluang dan Kesehatan Perkotaan. Pusat tersebut digunakan untuk memberikan akses pendidikan, rekreasi, serta pelayanan kesehatan kepada anak-anak yang memiliki potensi untuk dieksploitasi oleh geng. Dalam pasal 30 ayat 2 (c), menambahkan bahwa kerja sama dengan organisasi regional juga ditunjukkan untuk meningkatkan bantuan teknis kepada negara berkembang guna membantu mereka dalam pemenuhan penerapan konvensi. Oleh karena itu, hasil koordinasi El Salvador dengan UNODC ROPAN, pemerintah mendapatkan bantuan teknis dan logistik yang ditunjukkan kepada PNC yang dimanfaatkan untuk mencegah kejahatan perdagangan manusia.

Pencegahan terhadap kejahatan transnasional terorganisir dituliskan dalam Pasal 31 UNTOC. Dalam pasal 31 ayat 1 UNTOC dijelaskan bahwa Negara Pihak diwajibkan untuk membentuk dan mempromosikan kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk mencegah kejahatan transnasional terorganisir. Melengkapi aturan dalam ayat tersebut, Pasal 9 ayat 1 Protokol menyatakan bahwa negara pihak harus menetapkan kebijakan, strategi, dan langkah-langkah yang efektif dalam mencegah

dan melindungi korban perdagangan orang, khususnya anak dan perempuan. Selaku negara pihak perjanjian, El Salvador mengupayakan pemenuhan kedua pasal tersebut. Sejak Bukele berkuasa, pemerintahannya membuat kebijakan Rencana Kontrol Wilayah yang bertujuan untuk mengekang kejahatan yang dilakukan oleh geng. Perdagangan manusia adalah salah satu kejahatan transnasional yang dilakukan oleh MS-13 dan Barrio 18. Oleh karena itu, ketika pemerintah berfokus pada pergerakan geng, maka disaat yang bersamaan kejahatan perdagangan manusia menurun. Strategi dan tindakan yang dilakukan di bawah payung Rencana Kontrol Wilayah adalah pengerahan patroli militer dan polisi secara permanen, pengadaan alat pribadi yang baru untuk pasukan keamanan, dan melakukan penahanan massal. Selain itu, pada tahun 2019, pemerintah menambah sebanyak 11 jaksa yang khusus ditujukan dalam penanganan kasus perdagangan manusia.

Pencegahan kejahatan perdagangan manusia juga termasuk upaya pemerintah untuk reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat. Aturan ini dituliskan pada pasal 31 ayat 3 UNTOC, yang menyatakan bahwa Negara Pihak wajib untuk mempromosikan reintegrasi orang-orang yang dihukum ke dalam masyarakat. Norma diupayakan untuk dilakukan oleh El Salvador sebagai Negara Pihak konvensi. Salah satu fase dalam Rencana Kontrol Wilayah akan berfokus pada rehabilitasi anggota geng, sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat. Pasal 9 ayat 5 Protokol, menambahkan bahwa Negara Pihak diharuskan untuk mengadopsi dan membentuk tindakan legislatif, pendidikan, sosial, dan budaya, untuk mencegah faktor pendorong segala bentuk eksploitasi orang, terutama anak-anak dan perempuan, yang mengarah pada perdagangan manusia. Sebagai Negara

Pihak Protokol, El Salvador mengupayakan pemenuhan pasal tersebut dengan membentuk Unit Rekonstruksi Struktur Sosial di Badan Kesejahteraan Sosial Pemerintah, yang selanjutnya melakukan pembangunan pusat berdinding kaca atau “kubus” yang diletakan di komunitas miskin. Tujuan pembangunan adalah untuk menyediakan akses pelatihan bagi anak muda dan sebagai tempat hiburan yang aman. Harapannya bangunan tersebut dapat mencegah anak berkeliaran di jalan dan direkrut oleh geng, karena waktunya banyak digunakan untuk berpartisipasi dalam kegiatan.

3.2 Analisis Faktor Kepentingan Nasional El Salvador terhadap Kepatuhan

Berdasarkan upaya-upaya yang dilakukan oleh El Salvador sebagai Negara Pihak dalam UNTOC dan *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children*, menunjukkan adanya kepatuhan. Apabila tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah El Salvador dielaborasi dengan Teori Kepatuhan oleh Ronald B Mitchell, maka kepatuhan El Salvador termasuk ke dalam kategori *Compliance as Independent Self-Interest*. Kategori kepatuhan tersebut menjelaskan bahwa pemenuhan kepentingan nasional menjadi latar belakang tindakan kepatuhan negara terhadap perjanjian internasional. El Salvador melakukan berbagai tindakan dan membentuk kebijakan yang berdasar pada norma UNTOC dan Protokol di atas dengan harapan dapat memenuhi kepentingan nasional nya.

Perjanjian yang berisikan norma dan aturan bertujuan untuk mendorong negara-negara dan organisasi internasional serta regional bekerja sama dalam rangka melindungi masyarakat, terutama kelompok rentan. Dibawah payung perjanjian, negara pihak diharapkan mendapatkan keuntungan, termasuk

pemenuhan kepentingan nasional yang didapatkan dari kepatuhannya sebagai anggota perjanjian dan proyek-proyek kerja sama dengan aktor terkait. Sebagai Negara Pihak, El Salvador beranggapan bahwa keanggotaannya terhadap UNTOC dan Protokol di atas dapat membantu negara nya untuk mengupayakan pemenuhan kepentingan nasional, salah satunya adalah untuk menangani kejahatan transnasional terorganisir, khususnya kejahatan perdagangan manusia.

Dalam teori kepatuhan, Mitchell menekankan bahwa fokus utama bukan terletak pada apakah negara patuh atau tidak terhadap perjanjian internasional, melainkan mengapa. Alasan dan atau faktor-faktor apa yang membuat negara patuh atau tidak terhadap rezim internasional. Ini juga berlaku terhadap kepatuhan yang dilakukan oleh El Salvador sebagai Negara Pihak UNTOC dan protokol di atas. Penulis akan menggunakan teori kepatuhan Mitchell untuk menganalisis alasan dan faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi kepatuhan El Salvador terhadap perjanjian ini. Sesuai dengan *Compliance as Independent Self-Interest*, kepatuhan yang dilakukan oleh El Salvador melalui tindakan dan kebijakan di negara nya, mencerminkan adanya keinginan untuk memenuhi kepentingan nasionalnya. Ambisi ini terutama dibawa oleh Presiden El Salvador, Nayib Bukele.

El Salvador telah menghadapi isu kejahatan transnasional terorganisir sejak lama. Sejak pemerintahan Francisco Flores, Presiden El Salvador (1999-2004), negara ini berfokus memerangi kejahatan geng. Tindakan kerasnya terhadap anggota geng sejalan dengan pembuatan kebijakannya yang dikenal dengan istilah “tangan besi”, seperti meningkatkan peran militer dalam menjamin keamanan publik. Pemerintahan sebelum Bukele berkuasa, dipimpin oleh Funes, tetap meneruskan kebijakan “tangan besi”. Termasuk upayanya untuk bernegosiasi

dengan pimpinan geng agar kejahatan transnasional terorganisir dapat menurun. Berdasarkan *Compliance as Independent Self-Interest*, negara seringkali memanfaatkan kesepakatan untuk mempromosikan kepentingan nasionalnya. Salah satu kepentingan nasional El Salvador adalah memerangi kejahatan transnasional terorganisir, yang diupayakan ratifikasi UNTOC dan Protokol di atas, masing-masing di tahun 2000 dan 2002. Artinya El Salvador memanfaatkan proses pembuatan kesepakatan tersebut untuk mempromosikan kepentingan nasionalnya.

Ketika El Salvador beralih kekuasaan ke tangan Bukele, kejahatan geng dan transnasional terorganisir juga tetap menjadi perhatian tersendiri. Berdasarkan *Compliance as Independent Self-Interest*, negara menggunakan perjanjian untuk mempromosikan kepentingan nasional mereka. Salah satu prioritas Bukele sebagai seorang presiden adalah keinginan untuk mereduksi kejahatan transnasional terorganisir secara radikal. Keinginan tersebut menjadi kepentingan nasional El Salvador yang harus diupayakan pemenuhannya. Melalui keanggotaannya dalam UNTOC dan Protokol di atas, dapat menjadikan dokumen ini sebagai dasar pembentukan kebijakan di negara nya. Kebijakan yang berorientasi pada norma perjanjian akan mengkategorisasikan El Salvador sebagai Negara Pihak yang patuh.

Kebijakan dan upaya El Salvador dalam menekan angka kejahatan perdagangan manusia, diantaranya seperti melakukan penangkapan pelaku kejahatan, berkoordinasi dengan organisasi regional, memberikan akses pelatihan kepada hakim & jaksa, serta menjalin kerja sama internasional dengan Honduras dan Guatemala. Tindakan-tindakan tersebut berorientasi pada tujuan UNTOC dan Protokol di atas, yang dimana mencerminkan kepatuhan El Salvador sebagai Negara Pihak perjanjian. Sesuai dengan *Compliance as Independent Self-Interest*,

kepatuhan yang dilakukan oleh negara ini memiliki tujuan untuk upaya pemenuhan kepentingan nasional. Bukele memiliki misi untuk mengekang pergerakan jaringan transnasional terorganisir dan kejahatan geng. Misi tersebut merupakan bagian dari kepentingan nasional negara El Salvador. Pencapaian kepentingan nasional dilakukan melalui upaya-upaya nya untuk mereduksi kejahatan transnasional, salah satunya kejahatan perdagangan manusia, dan meningkatkan kapasitas masyarakat El Salvador.

Upaya pemberian bantuan dan perlindungan kepada korban kejahatan perdagangan manusia juga dilakukan oleh El Salvador sebagai Negara Pihak perjanjian. Tindakan yang dimaksud seperti bekerja sama dengan AS Mujeres dalam pemberian perawatan medis dan psikologis kepada lima orang perempuan yang telah menjadi korban perdagangan manusia. Selain itu, Kejaksaan Agung bersama dengan Kepolisian, LSM, organisasi internasional, dan Dewan anti-perdagangan manusia, membantu 111 korban dengan penginapan sementara, penempatan kerja, dan pelatihan. Berdasarkan *Compliance as Independent Self-Interest*, tindakan tersebut dilatarbelakangi oleh keinginan untuk memenuhi kepentingan nasional. Kepentingan yang dimaksud adalah pemulihan mental korban dan peningkatan kapasitas pengetahuan.

Dengan pemberian akses kesehatan dan pendidikan, maka penduduk akan dapat terhindar dari kejahatan perdagangan manusia, karena pengetahuan yang dimiliki meningkat. Ketika kapasitas masyarakat El Salvador meningkat, maka kemungkinan mereka untuk keluar dari lingkaran kemiskinan juga lebih besar, karena memiliki peluang masa depan yang lebih cerah. Dari kepatuhannya untuk memberikan kesempatan kerja dan pelatihan, memberikan pengaruh yang cukup

nyata dalam menekan angka pengangguran masyarakat El Salvador. Menurut data dari Central Reserve Bank (BCR), pada tahun 2022, sekitar 34.450 orang Salvador telah merubah status pengangguran mereka menjadi pekerja. Dalam versi terbarunya, Survei Rumah Tangga dan Tujuan Berganda menjelaskan bahwa tingkat pengangguran turun menjadi 5% pada tahun 2022 (Villeda J. , 2023). Perlu diketahui, bahwa faktor pengangguran merupakan salah satu penyebab masyarakat terjerumus ke dalam praktik perdagangan manusia. Ketika faktor ini berhasil untuk ditekan, maka angka kejahatan perdagangan manusia juga menurun.

El Salvador merupakan salah satu negara berkembang di Amerika Latin. Melalui keanggotaannya dalam UNTOC dan Protokol di atas, negara ini banyak mendapatkan manfaat. Sebagai negara berkembang yang memiliki keterbatasan dalam penyediaan sumber daya, baik pendanaan, administrasi, dan ekonomi, kepatuhannya terhadap perjanjian ini cukup memberikan banyak keuntungan bagi perang melawan kejahatan perdagangan manusia. Beberapa norma dalam perjanjian ini mewajibkan negara pihak untuk bekerja sama dengan organisasi internasional dan regional dalam upaya penanganan kejahatan transnasional, termasuk perdagangan manusia. Keterbatasan sumber daya pada pendanaan, membuat pemerintah tidak dapat memberikan akses pelatihan tentang pencegahan perdagangan manusia secara berkala kepada otoritas terkait. Sementara itu, implementasi norma oleh pemerintah yang berkoordinasi dengan organisasi regional, UNODC ROPAN, berhasil mendapatkan fasilitator untuk memberikan pelatihan kepada penegak hukum garis depan yang khusus menangani kejahatan perdagangan manusia. Berdasarkan *Compliance as Independent Self-Interest*, koordinasi yang dilakukan oleh El Salvador dengan organisasi regional merupakan

bentuk kepatuhannya terhadap UNTOC dan Protokol di atas. Karena dianggap dapat mengupayakan pemenuhan kepentingan nasional negara nya yang berstatus sebagai negara berkembang, yakni mendapatkan bantuan pemberian pelatihan kepada pejabat terkait. Sehingga kapasitas petugas dapat ditingkatkan dan kejahatan perdagangan manusia dapat ditekan.

Berdasarkan norma yang tertulis di UNTOC dan Protokol di atas, El Salvador diwajibkan untuk membentuk kebijakan yang bertujuan untuk menekan kejahatan transnasional terorganisir, terutama perdagangan manusia. Norma tersebut diimplementasikan dengan pembentukan kebijakan Rencana Kontrol Wilayah dan Keadaan Pengecualian. Anggaran yang digunakan untuk kebijakan tersebut adalah \$575 juta untuk periode 2019-2021. Melalui kebijakan itu, pemerintah memperketat kontrol di wilayah rawan kejahatan perdagangan manusia dengan mengerahkan beribu-ribu personel polisi dan militer. Melalui kepatuhannya dengan membentuk kebijakan, kepentingan nasional untuk mereduksi kejahatan perdagangan manusia terus diupayakan pemenuhannya. Dibuktikan dengan angka kasus kejahatan yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Angka kasus perdagangan manusia mencapai 80 kasus di tahun 2019. Satu tahun berikutnya, turun menjadi 30 kasus. Angka kasus perdagangan manusia naik kembali pada tahun 2021, sebanyak 45 kasus. Namun, turun menjadi 36 kasus pada tahun 2022.

Pemerintah juga memberikan wewenang kepada otoritas keamanan publik untuk menggunakan uang, senjata, dan properti yang telah disita dari geng untuk melawan diri mereka sendiri. Dari akun *twitter* nya, Bukele menyatakan bahwa “Dengan cara ini, kami akan menggunakan sumber daya mereka sendiri untuk melawan mereka”. Pada 2019, sekitar \$3,5 juta disita dari geng dan \$10 juta disita

pada tahun 2020 (BBC, 2022). Kepatuhan pemerintah terhadap norma dalam perjanjian ini memberikan dampak yang signifikan terhadap upaya pemenuhan kepentingan nasional nya. Fakta membuktikan bahwa angka pembunuhan menurun drastis, yang sejalan dengan keberhasilan mengekang pergerakan jaringan kejahatan transnasional terorganisir. Sehingga keamanan masyarakat El Salvador didapatkan kembali oleh penduduk dan kehidupan kembali berjalan normal.

Dari semua kebijakan yang mengkategorisasikan El Salvador sebagai Negara Pihak yang patuh terhadap UNTOC dan Protokol di atas, tindakan-tindakan tersebut bukan sekedar untuk pemenuhan kepentingan nasional negara ini. Melainkan untuk pemenuhan kepentingan pribadi Bukele, yakni melanggengkan dan memperkuat kekuasaannya sebagai Presiden El Salvador. Pada masa awal jabatan Bukele sebagai Presiden, partai nya tidak memiliki banyak suara di majelis, dimana suara digunakan untuk memenangkan pemilihan legislatif pada 28 Februari 2021. Salah satu cara untuk menghimpun suara adalah pembuktian terhadap kemampuan pemerintahan Bukele untuk menekan angka pembunuhan. Oleh karena itu, Bukele membentuk kebijakan Rencana Kontrol Wilayah dan Keadaan Pengecualian. Kedua kebijakan tersebut sangat memiliki dampak signifikan terhadap pergerakan geng dan jaringan kejahatan transnasional terorganisir, termasuk perdagangan manusia dan pembunuhan. Sejak terpilihnya Bukele sebagai presiden, tingkat pembunuhan telah turun lebih dari 60%, menjadi penurunan yang paling signifikan dalam sejarah negara ini (International Crisis Group, 2020).

Untuk semakin menekan angka kejahatan, pemerintah disinyalir melakukan negosiasi secara rahasia dengan pimpinan geng yang ada di penjara, dan menghasilkan pakta rahasia. Hasil kesepakatan antara pemerintah dan geng adalah

persetujuan untuk memberikan timbal balik atas hal yang dilakukan oleh masing-masing pihak. Geng akan berkoordinasi dengan anggota nya untuk mereduksi kejahatan, dan pemerintah akan memberikan ‘fasilitas’ yang lebih baik terhadap anggota geng yang ada di penjara. Selain itu, kesepakatan juga termasuk kesediaan geng untuk memberikan suara kepada partai Bukele, *Nuevas Ideas*, untuk pemilihan legislatif 2021. Hasilnya partai ini memenangkan suara mayoritas, yakni lima puluh enam kursi dari delapan puluh empat kursi. Tanggapannya terhadap kejahatan transnasional terorganisir, termasuk upaya nya dalam menekan kejahatan perdagangan manusia, memiliki dampak bagi keberhasilan politiknya yang gemilang.

Menurut survei putaran pertama studi “Panel Pemilihan: El Salvador 2022-2024”, didapatkan hasil survei, bahwa per Juni 2022, ekonomi dan keamanan menjadi masalah yang sangat diperhatikan oleh penduduk Salvador. Survei melibatkan 3000 orang, yang berusia di atas 18 tahun. Ketika bertanya kepada orang Salvador, masalah apa yang paling menjadi perhatian, sebanyak 33,2% menjawab ketidakamanan, geng, kekerasan, dan kejahatan. Kekerasan dan ketidakamanan menjadi masalah terpenting pada tahun 2021, namun menurun dari 46,8% menjadi 33,2% pada tahun 2022 (Ungo, 2022).

Berdasarkan *Compliance as Independent self-interest*, kepatuhan dilakukan oleh sebuah negara karena ingin terhindar dari opini publik yang merugikan. Penumpasan terhadap geng hanya sebagai pengalihan, dimana tujuan utamanya adalah membentuk citra kepemimpinan Bukele dihadapan masyarakat El Salvador, dan pada akhirnya dapat menghimpun dukungan untuk pemilihan presiden tahun 2024. Pengaruh kepatuhan yang dilakukan oleh Bukele, mulai menunjukkan

keberhasilan untuk membentuk citra Bukele. Dibuktikan dengan hasil survei yang menyatakan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Republik adalah tertinggi dibandingkan dengan institusi lain, yakni 69,5%. Evaluasi warga juga menunjukkan hal yang positif, karena 9 dari 10 orang Salvador (89,0%) percaya bahwa Presiden Nayib Bukele telah melakukan pekerjaan yang sangat baik.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan *Compliance Theory* oleh Ronald B Mitchell, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan yang dilakukan oleh El Salvador termasuk ke dalam kategori *Compliance as Independent Self-Interest*, yakni kepatuhan yang dilakukan karena perjanjian banyak mewakili kepentingan nasionalnya. Artinya pemenuhan kepentingan nasional adalah penentu seberapa patuh negara terhadap perjanjian. El Salvador memiliki beberapa kepentingan nasional yang harus diupayakan pemenuhannya. Melalui kepatuhannya terhadap UNTOC dan Protokol di atas, harapan untuk memenuhi kepentingan negaranya cukup tinggi, salah satunya adalah keinginan untuk memerangi kejahatan transnasional terorganisir, khususnya perdagangan manusia.

Kepatuhan El Salvador terhadap UNTOC dan Protokol di atas, membuat Bukele membentuk kebijakan-kebijakan yang berdasar pada norma di kedua perjanjian tersebut. Berdasarkan *Compliance as Independent Self-Interest*, El Salvador menerapkan beberapa kebijakan dengan tujuan untuk memenuhi kepentingan nasionalnya. Pertama, keinginan untuk mereduksi kejahatan geng secara radikal. Kebijakan yang didasarkan pada norma kedua perjanjian di atas akan memfokuskan pemerintahan Bukele untuk memerangi kejahatan transnasional terorganisir oleh geng. Oleh karena nya, pemenuhan kepentingan nasional berupa pemberantasan aktivitas geng, termasuk perdagangan manusia dapat diupayakan.

Kedua, kepatuhan dilakukan oleh El Salvador dengan tujuan ingin meningkatkan kapasitas pengetahuan Salvadorans. Peningkatan kapasitas merupakan salah satu kepentingan nasional El Salvador yang harus diupayakan. Orang menjadi korban perdagangan manusia dikarenakan tidak tersedianya akses pendidikan yang cukup, yang disebabkan oleh faktor ekonomi. Terbatasnya akses Pendidikan akan berdampak pada rendahnya pengetahuan, sehingga akan lebih mudah untuk ditipu dan pada akhirnya dieksploitasi oleh geng. Kepentingan ini membuat Bukele menerapkan kebijakan yang berdasar pada norma kedua perjanjian di atas, dengan memberikan bantuan dan perlindungan terhadap korban, berupa pemberian akses pendidikan, kesehatan, dan hiburan.

Kepentingan lain yang ingin dipenuhi oleh El Salvador dari kepatuhannya terhadap UNTOC dan Protokol di atas adalah memberikan akses pelatihan kepada otoritas terkait. Sebagai negara berkembang, keterbatasan sumber daya menjadi penghalang pemerintah untuk memberikan akses pelatihan dalam hal pencegahan kejahatan transnasional terorganisir kepada pihak berwenang. Kepatuhannya terhadap kedua perjanjian di atas, membuat Bukele menjalin kerja sama dengan organisasi regional yang memberikan fasilitas pelatihan kepada otoritas terkait. Tindakan tersebut didasarkan pada norma dalam UNTOC dan Protokol di atas yang mewajibkan Negara Pihak untuk berkoordinasi dengan organisasi regional dalam menghadapi kejahatan transnasional terorganisir.

Compliance as Independent Self-Interest juga menjelaskan bahwa kepatuhan dilakukan oleh negara untuk terhindar dari opini publik yang merugikan. Kepatuhan ini ditunjukkan oleh keinginan Bukele untuk membentuk citra kepemimpinannya. Pembentukan kebijakan-kebijakan dan upaya yang dilakukan

oleh Bukele bukan semata-mata untuk memenuhi kepentingan nasional El Salvador, melainkan untuk menghimpun suara dari masyarakat El Salvador dalam pemilihan presiden yang akan berlangsung pada tahun 2024. Keberhasilan-keberhasilan Bukele untuk mengekang geng hanya sebagai pengalihan, dimana kemungkinan yang dimaksud sebenarnya adalah untuk memperkuat kontrol dan melanggengkan kekuasaan Bukele. Oleh karena itu, kepatuhan yang dilakukan oleh negara ini

Sampai skripsi ini ditulis, menunjukkan bahwa El Salvador patuh terhadap UNTOC dan Protokolnya. Tetapi hasil kepatuhan belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Patuhnya hanya sebatas dia berupaya membentuk kebijakan yang berdasar pada undang-undang domestik negaranya yang diratifikasi karena dia menaati UNTOC dan Protokolnya, tetapi hasil kepatuhan belum cukup memuaskan. Dibuktikan dengan angka kasus kejahatan perdagangan manusia yang masih fluktuatif dari tahun 2019-2022. Berdasarkan laporan tahunan milik U.S Department of State, El Salvador masih berada pada Tingkat 2 (*Tier 2*) dalam upaya nya memerangi kejahatan perdagangan manusia. Sementara terus mengalami kemunduran dari tahun 2021 hingga 2022, yang ditunjukkan dari melemahnya upaya yang dilakukan untuk memerangi kejahatan ini. Kemunduran dibuktikan dari laporan tahunan yang menyatakan bahwa El Salvador diturunkan ke Daftar Pengawasan Tingkat 2 (*Tier 2 Watch List*). Mengingat periode kepemimpinan Bukele masih berjalan hingga tahun 2024, maka tidak dapat dikatakan kalau Bukele belum berhasil sepenuhnya, karena masih ada waktu dan kesempatan untuk dia mengupayakan pemenuhan kepentingan nasionalnya dengan mungkin membentuk kebijakan baru yang lebih efektif lagi.

4.2 Rekomendasi

Dalam penelitian skripsi ini penulis menemui hambatan dalam mengelaborasi teori dengan studi kasus. Karena definisi kepatuhan tidak diberikan secara jelas oleh Ronald B Mitchell. Oleh karena itu, rekomendasi yang diberikan oleh penulis untuk penelitian berikutnya adalah lebih cermat dalam memilih teori dan harus benar memahami setiap bagian dari teori tersebut. Penulis juga menemui hambatan pada pencarian sumber bacaan. Penulis menemukan sumber bacaan dan data yang berbahasa Inggris lebih sedikit. Oleh karena itu, penulis mencoba mencari sumber bacaan dan data dalam bahasa Spanyol. Keterbatasan penulis dalam memahami bahasa Spanyol membuat proses penulisan skripsi sedikit terhambat dan berjalan lebih lama. Saran penulis adalah peneliti selanjutnya setidaknya benar-benar tertarik dengan isu yang ada di negara yang dimaksud, atau memiliki keinginan tinggi untuk melakukan penelitian tersebut.

Daftar Pustaka

- International Crisis Group. (2020). *Miracle or Mirage? Gangs and Plunging Violence in El Salvador*. International Crisis Group. Dipetik January 20, 2023, dari <https://www.crisisgroup.org/latin-america-caribbean/central-america/el-salvador/81-miracle-or-mirage-gangs-and-plunging-violence-el-salvador>
- U.S Embassy In El Salvador. (2022). *El Salvador 2022 TIP Report*. U.S Embassy In El Salvador. Dipetik February 10, 2023, dari <https://sv.usembassy.gov/our-relationship/official-reports/el-salvador-2022-tip-report/#:~:text=Traffickers%20exploit%20Salvadoran%20men%2C%20women,en%20route%20or%20upon%20arrival>.
- Arevalo, K. (2022). *Por qué hay un elevado desempleo en El Salvador?* San Salvador: elsalvador.com. Dipetik February 20, 2023, dari <https://www.elsalvador.com/noticias/negocios/empleo-y-desempleo-bm-afp-iss/974905/2022/>
- Ayala, E. (2019). *Central America – Fertile Ground for Human Trafficking*. IPS. Dipetik January 27, 2023, dari <https://www.ipsnews.net/2019/11/central-america-fertile-ground-human-trafficking/>
- BBC. (2022). *Bukele contra las maras: 3 polémicas medidas aprobadas por El Salvador para combatir a las pandillas*. BBC News Mundo. Dipetik July 6, 2023, dari <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-60989174>
- Boerman, D. T. (2019, December). *FAMILY AS A SOCIAL CONSTRUCT IN EL SALVADOR, HONDURAS, AND GUATEMALA: VISIBILITY AND VULNERABILITY OF FAMILY MEMBERS OF INDIVIDUALS TARGETED BY ORGANIZED CRIMINAL GROUPS*. Dipetik January 29, 2023, dari <https://www.semanticscholar.org/paper/Family-as-a-Social-Construct-in-El-Salvador%2C-and-of-Boerman/5321357ad6bbf175ef6d04676eeaa3e3a77e2e36>
- Brigida, A.-C. (2020). *El Salvador's government cut deals with MS-13 gang in bid to reduce killings, report says*. Washington Post. Dipetik January 29, 2023, dari https://www.washingtonpost.com/world/the_americas/el-salvador-gangs-violence/2020/09/05/8fb8734e-eee3-11ea-bd08-1b10132b458f_story.html
- Carlos Martínez, Ó. M. (2020). *Bukele Has Been Negotiating with MS-13 for a Reduction in Homicides and Electoral Support*. El Faro. Dipetik January 23, 2023, dari [60](https://elfaro.net/en/202009/el_salvador/24785/Bukele-Spent-A-</p></div><div data-bbox=)

Year-Negotiating-with-MS-13-for-a-Reduction-in-Homicides-and-Electoral-Support.htm

- CONNA. (2019). *Insumo para la preparación de informe temático final de la Relatora Especial sobre la venta y la. Consejo Nacional De La Niñez Y De La Adolescencia. El Salvador: Republica De El Salvador En La America Central. Dipetik October 15, 2022, dari Republica De El Salvador En La America Central.*
- Decker, S. (2020, June 26). *5 Facts About Poverty in El Salvador. Dipetik February 17, 2023, dari The Brogen Project: <https://borgenproject.org/5-facts-about-poverty-in-el-salvador/>*
- ECLAC. (2022). *Poverty Rates in Latin America Remain Above Pre-Pandemic Levels in 2022, ECLAC Warns. the Economic Commision for Latin America and the Caribbean. Dipetik January 17, 2023, dari <https://www.cepal.org/en/pressreleases/poverty-rates-latin-america-remain-above-pre-pandemic-levels-2022-eclac-warns>*
- ECLAC. (2022). *UNESCO, UNICEF and ECLAC warn that at the current rate, Latin America and the Caribbean will not achieve the education goals set by the 2030 Agenda for Sustainable Development. the Economic Commision for Latin America and the Caribbean. Dipetik January 18, 2023, dari <https://www.cepal.org/en/pressreleases/unesco-unicef-and-eclac-warn-current-rate-latin-america-and-caribbean-will-not-achieve>*
- End Violence. (2021). *El Salvador, Guatemala and Honduras Pledge to Work Together to Protect Children Online. End Violence Against Children. Dipetik January 26, 2023, dari <https://www.end-violence.org/articles/el-salvador-guatemala-and-honduras-pledge-work-together-protect-children-online>*
- Farah, D. (2011, February). *Organized Crime in El Salvador: The Homegrown and Transnational Dimensions. 3-30. Dipetik July 30, 2022, dari <https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/media/documents/event/Farah.FIN1.pdf>*
- Galdamez., E. (2022, November 11). *Poverty in El Salvador, an issue that leads to crime and migration. Dipetik February 18, 2023, dari El Salvador Info: <https://elsalvadorinfo.net/poverty-in-el-salvador/>*
- Global Organized Crime Index. (2021). *Global Organized Crime Index - El Salvador. Dipetik January 16, 2023, dari Global Organized Crime Index: https://ocindex.net/assets/downloads/english/ocindex_profile_el_salvador.pdf*
- González, T. M. (2022). *Maras in El Salvador: Who is Nayib Bukele Facing? Latin America Post. Dipetik January 30, 2023, dari <https://latinamericanpost.com/40618-maras-in-el-salvador-who-is-nayib-bukele-facing>*

- Gressier, G. C. (2021). *Sting Operation against Migrant Caravan Arrests Working-Class Migrants as Human Traffickers*. El Faro. Dipetik January 23, 2023, dari https://elfaro.net/en/202105/el_salvador/25479/Sting-Operation-against-Migrant-Caravan-Arrests-Working-Class-Migrants-as-Human-Traffickers.htm
- Kinosian, S. (2021). *EXCLUSIVE Salvadoran ex-prosecutor says government quashed probe into pact with gangs*. San Salvador: Reuters. Dipetik January 20, 2023, dari <https://www.reuters.com/world/americas/exclusive-salvadoran-ex-prosecutor-says-government-quashed-probe-into-pact-with-2021-12-28/>
- Langberg, L. (2005). A Review of Recent OAS Research on Human Trafficking in the Latin American and Caribbean Region. Dalam I. O. Migration, & E. G. Frank Laczko (Penyunt.), *Data and Research on Human Trafficking: A Global Survey* (hal. 129-140). Geneva, Switzerland: IOM. Dipetik June 20, 2022, dari https://publications.iom.int/system/files/pdf/global_survey.pdf
- Lemus, R. L. (2022). *Nuevas Ideas Legislator Took Office despite Accusations of Human Trafficking*. elfaro. Dipetik January 21, 2023, dari https://elfaro.net/en/202202/el_salvador/26033/Nuevas-Ideas-Legislator-Took-Office-despite-Accusations-of-Human-Trafficking.htm
- Lopez, J. A. (t.thn.). *Con miles de víctimas y muy pocas condenas, está por verse aquello de que el crimen no paga para el caso de los tratantes de personas en el Triángulo Norte*. Connectas. Dipetik January 30, 2023, dari <https://www.connectas.org/el-delito-que-no-se-combate-2/>
- Maria Alejandra Navarrete, A. A. (2020). *Capital Murder: 2019 Homicide Rates in Latin America's Capital Cities*. InsightCrime. Dipetik January 17, 2023, dari <https://insightcrime.org/news/analysis/2019-homicides-latin-america-capital/>
- María Sol Pikielny, M. J. (2021, February). Institutional and Legal Migratory Framework of the Republic of El Salvador: A Working Paper. 1-8. Dipetik August 20, 2022, dari <https://www.migrationpolicy.org/sites/default/files/publications/mpi-institutional-legal-framework-el-salvador.pdf>
- Ministerio de Educacion. (2022). *Estadísticas e indicadores*. Dipetik February 20, 2023, dari Ministerio de Educacion: <https://www.mined.gob.sv/estadisticas/2022/3/3.5%20Tasa%20espec%20C3%ADfca%20de%20matr%20C3%ADcula%20por%20grado.pdf>
- Ministerio de Relaciones Exteriores. (2021). *CUESTIONARIO SOBRE “NEXO ENTRE DESPLAZAMIENTO FORZADO Y FORMAS CONTEMPORANEAS*. Dipetik January 19, 2023, dari https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Slavery/SR/ReportHRC48/States/El_Salvador-es.pdf

- Mitchell, R. B. (1996, March 28). Compliance Theory: An Overview. (J. W. James Cameron, Penyunt.) 3-6. Dipetik September 25, 2022
- Observatorio. (2021). *Trata en El Salvador a abril 2021*. Observatorio De Violencia Contra Las Mujeres. Dipetik October 20, 2022, dari <https://observatoriodeviolenciaormusa.org/wp-content/uploads/2021/11/Trata-de-personas-un-delito-silencio-y-lucrativo.pdf>
- OCHA. (2022, August 10). *Women in El Salvador's Gang War: Surviving the State of Exception*. Dipetik January 17, 2023, dari Reliefweb: <https://reliefweb.int/report/el-salvador/women-el-salvadors-gang-war-surviving-state-exception>
- OIM. (2021). *Evaluacion de Flujos Migratorios Irregulares Y Seguimiento A la Movilidad en Localidades Fronterizas Bajo el Contexto de la Covid-19 El Salvador - Reporte Anual Junio 2020-Julio 2021*. OIM. Dipetik February 20, 2023
- Overheid Treaty Database. (t.thn.). *Protocol to Prevent, Suppress and Punish trafficking in Persons, especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime Parties with reservations, declarations and objections*. Overheid.nl. Dipetik January 19, 2023, dari https://treatydatabase.overheid.nl/en/Verdrag/Details/009349_b#E1%20Salvador
- Parlberg, M. (2022). *The Emerging Gang State in El Salvador El Salvador*. the Global Americans. Dipetik January 20, 2023, dari <https://theglobalamericans.org/2022/02/the-emerging-gang-state-in-el-salvador/>
- Rouhandeh, A. J. (2021). *El Salvador Prosecutor Says Government Formed 'Pact' With MS-13 to Keep Peace*. Newsweek. Dipetik January 21, 2023, dari <https://www.newsweek.com/el-salvador-prosecutor-says-government-formed-pact-ms-13-keep-peace-1663754>
- SICA. (2021). *Vicepresidentes de El Salvador, Guatemala y Honduras, acuerdan articular acciones para prevenir y combatir la trata de personas y tráfico ilícito de Migrantes en la región*. Antigua: Plan Trifinio. Dipetik January 27, 2023, dari <https://www.plantrifinio.int/noticias/254-vicepresidentes-de-el-salvador-guatemala-y-honduras-acuerdan-articular-acciones-para-prevenir-y-combatir-la-trata-de-personas-y-traffic-ilicito-de-migrantes-en-la-region>
- Tenorio, P. O. (2019). *VIDEO: Hay 16,000 esclavos en El Salvador que son obligados a trabajo forzado y prostitución*. Dipetik January 20, 2023, dari <https://historico.elsalvador.com/historico/575360/16-000-esclavos-en-el-salvador.html>

- the Global Economy. (2020). *Literacy rate - Country rankings*. Dipetik January 17, 2023, dari the Global Economy.com: https://www.theglobaleconomy.com/rankings/literacy_rate/Latin-Am/
- Thomas J. Boerman, A. G. (2020, February 3). Gangs and Modern-Day Slavery in El Salvador, Honduras and Guatemala: A Non-Traditional Model of Human Trafficking. *Journal of Human Trafficking*, 8-9. doi:10.1080/23322705.2020.1719343
- Thomas J. Boerman, A. G. (2020, February 3). Gangs and Modern-Day Slavery in El Salvador, Honduras and Guatemala: A Non-Traditional Model of Human Trafficking. *Journal of Human Trafficking*, 9-13. doi:10.1080/23322705.2020.1719343
- Trading Economics. (2022). *El Salvador Unemployment Rate*. Trading Economics. Dipetik February 17, 2023, dari <https://tradingeconomics.com/el-salvador/unemployment-rate>
- Trajano, J. C. (2018, July 1). Combatting Human Trafficking in East Asia: Mind the Gaps. *JSTOR*, 5-6. Dipetik February 7, 2023, dari https://www.jstor.org/stable/pdf/resrep26881.pdf?refreqid=excelsior%3A998b0700cded9cc752de4302b2a69881&ab_segments=0%2F5YC-6744_basic_search%2Ftest-2&origin=&initiator=&acceptTC=1
- Trajono, J. C. (2020, December 23). Deportations and Development: Responding to El Salvador's New Migration Crisis. *SAGE Journals*, 35(7), 1-8. doi:<https://doi.org/10.1177/0269094220981052>
- U.S Department of Labor. (2021). *Child Labor and Forced Labor Reports*. U.S Department of Labor. Dipetik February 15, 2023, dari <https://www.dol.gov/agencies/ilab/resources/reports/child-labor/el-salvador>
- U.S Department of Labor. (2021). *Child Labor and Forced Labor Reports*. Dipetik January 16, 2023, dari Bureau of International Labor Affairs: <https://www.dol.gov/agencies/ilab/resources/reports/child-labor/el-salvador>
- U.S Department of State. (2020). *2020 Trafficking in Persons Report: El Salvador*. Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons. U.S Department of State. Dipetik January 15, 2023, dari <https://www.state.gov/reports/2020-trafficking-in-persons-report/el-salvador/>
- U.S Department of State. (2021). *2021 Trafficking in Persons Report: El Salvador*. Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons. U.S Department of State. Dipetik January 27, 2023, dari <https://www.state.gov/reports/2021-trafficking-in-persons-report/el-salvador/>
- U.S Department of State. (2021). *2021 Trafficking in Persons Report: El Salvador*. Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons. U.S Department of State. Dipetik January 15, 2023, dari <https://www.state.gov/reports/2021-trafficking-in-persons-report/el-salvador/>

- U.S Department of State. (2022). *2022 Trafficking in Persons Report: El Salvador*. Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons. U.S Department of State. Dipetik January 15, 2023, dari <https://www.state.gov/reports/2022-trafficking-in-persons-report/el-salvador/>
- U.S Department of State. (2023). *2023 Trafficking in Persons Report: El Salvador*. OFFICE TO MONITOR AND COMBAT TRAFFICKING IN PERSONS. U.S Department of State. Dipetik July 7, 2023, dari <https://www.state.gov/reports/2023-trafficking-in-persons-report/el-salvador/>
- U.S Department of the Treasury. (2021). *Treasury Targets Corruption Networks Linked to Transnational Organized Crime*. Washington: U.S Department of the Treasury. Dipetik January 21, 2023, dari <https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0519>
- U.S Embassy. (2020). *El Salvador 2020 TIP Report*. U.S Embassy in El Salvador. Dipetik January 27, 2023, dari <https://sv.usembassy.gov/our-relationship/official-reports/el-salvador-2020-tip-report/>
- UN Women. (2012). *Consejo Nacional contra la Trata de Personas*. Dipetik January 24, 2023, dari Global Database on Violence against Women: <https://evaw-global-database.unwomen.org/en/countries/americas/el-salvador/2012/consejo-nacional-contra-la-trata-de-personas>
- Ungo, G. M. (2022). *Economía y seguridad entre los problemas más preocupantes para los salvadoreños en 2022*. Dipetik July 6, 2023, dari Funda Ungo: <https://www.fundaungo.org/sv/economia-y-seguridad-entre-los-problemas-mas-preocupantes-para-los-salvadorenos-en-2022>
- UNHCR. (2021). *Central America and Mexico Operational Update*. UNHCR. Dipetik February 15, 2023
- United Nations. (2023). *United Nations Treaty Collection*. United Nations. Dipetik January 19, 2023, dari https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XVIII-12&chapter=18&clang=_en#EndDec, 2023
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2004). *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime and the Protocol Thereto*. Dipetik January 19, 2023, dari United Nations: https://www.unodc.org/documents/middleeastandnorthafrica/organised-crime/UNITED_NATIONS_CONVENTION_AGAINST_TRANSNATIONAL_ORGANIZED_CRIME_AND_THE_PROTOCOLS_THERETO.pdf
- UNODC ROPAN. (2020). *Training on human trafficking in El Salvador*. UNODC. Dipetik January 26, 2023, dari <https://www.unodc.org/ropan/en/training-on-human-trafficking-in-el-salvador.html>
- UNODC. (t.thn.). *Signatories to the United Nations Convention against Transnational Crime and its Protocols*. Dipetik January 19, 2023, dari

- United Nations Office on Drugs and Crime:
<https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/signatures.html>
- UNODC. (t.thn.). *United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto*. Dipetik January 19, 2023, dari United Nations Office on Drugs and Crime:
<https://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/intro/UNTOC.html>
- Villeda, A. (2019). *FGR ordena detenciones por Trata de Personas*. FGR El Salvador. Dipetik January 26, 2023, dari <https://www.fiscalia.gob.sv/fgr-ordena-detenciones-por-trata-de-personas/>
- Villeda, J. (2023, May 11). *Más de 34,400 salvadoreños salieron de las filas del desempleo en 2022*. Dipetik July 6, 2023, dari EL MUNDO:
<https://diario.elmundo.sv/economia/mas-de-34400-salvadorenos-salieron-de-las-filas-del-desempleo-en-2022>